PEMERINTAH KOTA MATARAM

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) PERUBAHAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD KOTA MATARAM



TAHUN ANGGARAN 2023

DOKUMEN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) PERUBAHAN
TAHUN 2023

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD KOTA MATARAM

LEMBAR PENGESAHAN

Mataram, 02 November 2023

Direktur
RSUD Kota Mataram

dr. Hj. Ni Ketut Eka Nurhayati, Sp.OG.,Subsp.F.E.R.,M.Kes.,M.Sc
NIP. 19720403 200212 2 004

Mengetahui :
Ketua Dewan Pengawas

dr. H. Usman Hadi
NIP.19631121 199603 1 002

Mengesahkan :
Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD)

H. Moh. Syakirm Hukmi, SE, MM
NIP.19640507 199203 1 016

LEMBAR PERSETUJUAN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN 2023

DEWAN PENGAWAS

Ketua



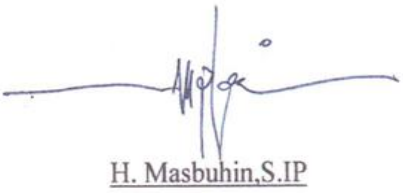
dr. H. Usman Hadi
NIP. 19631121 199603 1 002

Anggota



H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM
NIP. 19640507 199203 1 016

Anggota



H. Masbuhin,S.IP

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rakhmat dan hidayah-Nya penyusunan laporan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat diselesaikan.

Penyusunan laporan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Perubahan ini dilaksanakan sebagai salah satu dokumen perencanaan yang disusun oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram ini dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Tahun Anggaran 2023.

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Perubahan ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram pada Tahun 2023. Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Mataram, 02 November 2023

Direktur
RSUD Kota Mataram

dr. Hj. Ni Ketut Eka Nurhayati, Sp.OG.,Subsp.F.E.R.,M.Kes.,M.Sc
NIP. 19720403 200212 2 004

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL..... -

LEMBAR PENGESAHAN..... i

LEMBAR PERSETUJUAN..... ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR BAGAN x

BAB I. PENDAHULUAN 1
- A. Gambaran Umum 1
- B. Visi dan Misi 2
- C. Maksud dan Tujuan Rumah Sakit 3
  - 1. Maksud 3
  - 2. Tujuan 3
- D. Kegiatan dan Produk Pelayanan 4
  - 1. Bidang Pelayanan Medik 4
  - 2. Bidang Pelayanan Penunjang 6
  - 3. Bidang Pelayanan Keperawatan 6
  - 4. Bagian Umum dan Kepegawaian 6
- E. Prinsip Dasar 6
  - 1. Akuntabilitas 7
  - 2. Kebersamaan 7
  - 3. Profesionalisme 7
  - 4. Kejujuran 7
  - 5. Keterbukaan 8
  - 6. Disiplin 8
- F. Susunan Pejabat Pengelola 8
  - 1. Pejabat Pengelola BLUD 8
  - 2. Dewan Pengawas 8

BAB II. KINERJA BLUD TAHUN ANGGARAN BERJALAN 9
- A. Kondisi Lingkungan Yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja 9
  - 1. Faktor Internal 9
  - 2. Faktor Eksternal 15

B. Perbandingan Asumsi Pada Waktu Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran Dengan Fakta Yang Terjadi 19
1. Aspek Makro 19
2. Aspek Mikro 20
C. Pencapaian Kinerja 20
1. Non Keuangan..... 20
2. Keuangan..... 21
D. Laporan Keuangan Tahun Berjalan..... 24
1. Neraca 24
2. Laporan Operasional..... 26
3. Laporan Arus Kas 27
BAB III. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN YANG DIANGGARKAN 29
A. Kondisi Lingkungan BLUD Yang Mempengaruhi 29
1. Analisis Internal 29
2. Analisis Eksternal 43
B. Asumsi Yang Digunakan 47
1. Aspek Makro 47
2. Aspek Mikro 48
C. Sasaran, Target, Kinerja dan Kegiatan 48
1. Pelayanan (Berdasarkan Kelompok) 48
2. Pelayanan (Berdasarkan Unit) 49
D. Program Kerja dan Kegiatan 49
1. Program Kerja 49
2. Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan/ Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 49
E. Perkiraan Pendapatan 50
1. Pendapatan Pelayanan Umum 50
2. Pendapatan JKN/BPJS 50
3. Pendapatan Kerjasama Operasional 50
4. Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah 51
5. Pendapatan Lainnya 51
6. Total Pendapatan BLUD 52
F. Perkiraan Biaya 53
G. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah 53
1. Anggaran Pendapatan/Penerimaan BLUD 53
2. Anggaran Biaya/Pengeluaran 54

H. Ambang Batas Rencana Bisnis Anggaran 56
I. Perkiraan Maju Pendapatan dan Realisasi Belanja 57
1. Anggaran Biaya/Pengeluaran APBD dan BLUD TA. 2023 57

BAB IV. PROYEKSI KEUANGAN TAHUN YANG AKAN DATANG 60
A. Proyeksi Pendapatan 60
B. Proyeksi Neraca 62
C. Proyeksi Laporan Operasional 63
D. Proyeksi Laporan Arus Kas 63
E. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Berjalan ... 65
1. Pendahuluan 65
2. Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja Keuangan 71
3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 73
4. Kebijakan Akuntansi 75
5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 97
6. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan 102

BAB V. PENUTUP 107
A. Kesimpulan 107
B. Saran 107

DAFTAR TABEL

halaman

Tabel 2.1. Jumlah Tenaga Kesehatan / Non Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram 12

Tabel 2.2. Aspek Makro 19

Tabel 2.3. Aspek Mikro 20

Tabel 2.4. Pencapaian kinerja dari aspek pelayanan berdasarkan unit). 20

Tabel 2.5. Pencapaian kinerja dari aspek Pendukung Pelayanan (berdasarkan unit) 21

Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Dari Aspek Pendapatan Berdasarkan Jenis Pelayanan 21

Tabel 2.7. Rincian Belanja Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Perubahan RSUD Kota Mataram Tahun 2023 22

Tabel 2.8. Pencapaian Program Investasi (Biaya Modal) RSUD Kota Mataram 23

Tabel 2.9. Pencapaian Program Pendanaan/Pembiayaan RSUD Kota Mataram 23

Tabel 2.10. Neraca RSUD Kota Mataram Per 30 Juni 2023 23

Tabel 2.11. Laporan Operasional RSUD Kota Mataram Per 30 Juni 2023 24

Tabel 2.12. Laporan Arus Kas RSUD Kota Mataram Per 30 Juni Tahun 2023 26

Tabel 3.1. Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2022 - 2023 27

Tabel 3.2. CRR dengan Gaji dan Tanpa Gaji Tahun 2023 30

Tabel 3.3. Kemampuan Kas Guna Membayar Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2022/2023 31

Tabel 3.4. Kemampuan Aset Lancar Guna Membayar Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2022/2023 32

Tabel 3.5. Kemampuan Total Aset Untuk Membayar Total Kewajiban Tahun 2022/2023 32

Tabel 3.6. Tingkat Efisiensi BLUD Semester I tahun 2023 33

Tabel 3.7. Tingkat Efektifitas Aset Terhadap Pendapatan BLUD Semester I Tahun 2023 34

Tabel 3.8. Tingkat Pengembalian Equitas BLUD Semester I Tahun 2023 34

Tabel 3.9. Jumlah Tenaga Kesehatan / Non Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram 37

Tabel 3.10. Asumsi makro yang digunakan sebagai pembanding dengan realisasi kuantitatif 47

Tabel 3.11. Asumsi mikro yang digunakan sebagai pembanding dengan realisasi kuantitatif 48

Tabel 3.12. Sasaran, target, kinerja dan kegiatan dari aspek pelayanan (berdasarkan Kelompok) 48

Tabel 3.13. Sasaran, target, kinerja dan kegiatan dari aspek pelayanan (berdasarkan unit) 49

Tabel 3.14. Perkiraan Pendapatan Pelayanan Umum pada RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023 50

Tabel 3.15. Perkiraan pendapatan JKN/BPJS pada RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023 50

Tabel 3.16. Perkiraan pendapatan kerjasama operasional pada RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023 51

Tabel 3.17. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah Pada RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023 51

Tabel 3.18. Perkiraan pendapatan lainnya pada RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023 51

Tabel 3.19. Perkiraan pendapatan lainnya pada RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023 52

Tabel 3.20. Perkiraan biaya pada RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023 53

Tabel 3.21. Anggaran Pendapatan/Penerimaan BLUD pada RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023 53

Tabel 3.22. Anggaran Biaya/Pengeluaran pada RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023 54

Tabel 3.23. Rincian Belanja Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Perubahan RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023 55

Tabel 3.24. Ambang Batas Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023 57

Tabel 3.25. Perkiraan Maju Pendapatan dan Realisasi Belanja RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023 57

Tabel 3.26. Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan TA. 2022 58

Tabel 4.1. Proyeksi pendapatan RSUD Kota Mataram (Tahun 2021 - 2026) 60

Tabel 4.2. Proyeksi Neraca RSUD Kota Mataram (Tahun 2021 – 2026).. 61

Tabel 4.3. Proyeksi Laporan Operasional RSUD Kota Mataram (Tahun 2021 – 2026) 63

Tabel 4.4. Proyeksi Laporan Arus Kas RSUD Kota Mataram (Tahun 2021 – 2026) 64

Tabel 4.5. Anggaran dan Belanja Daerah RSUD Kota Mataram Tahun Anggaran 2023 71

Tabel 4.6. Belanja Tidak Langsung RSUD Kota Mataram Tahun Anggaran 2023 73

Tabel 4.7. Realisasi Anggaran Posisi Bulan Juni Tahun 2023 RSUD Kota Mataram 74

Tabel 4.8. Rincian Atas Jumlah Pendapatan RSUD Kota Mataram Tahun Anggaran 2023 97

Tabel 4.9. Rincian Atas Lain-Lain Pendapatan Yang Sah RSUD Mataram Tahun Anggaran 2023 98

Tabel 4.10. Neraca Komparatif Tahun 2022 dan Per Juni Tahun 2023 .. 99

Tabel 4.11. Laporan Operasional (LO) RSUD Kota Mataram Per Juni Juni Tahun 2023 101

DAFTAR BAGAN

halaman

Tabel 4.1. Struktur Organisasi RSUD Kota Mataram 103

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan elemen penting dari kesejahteraan diwujudkan sesuaidengan cita-cita Bangsa Indonesia yang disebutkan dalamPancasila dan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai aturan implementasinya tertuang dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana dalam Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan "Kesehatan adalah fisik, mental, spiritual dan social, agar setiap orang dapat menjalani kehidupan yang bermakna secara sosial dan hemat". Oleh karena itu, kesehatan merupakan bagian dari upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut harus tercapai dalam penyediaan fasilitas kesehatan.

Rumah sakit merupakan bagian penting dari sistem kesehatan. Rumah Sakit menyediakan pelayanan kuratif komplek, pelayanan gawat darurat, pusatalih pengetahuan dan teknologi, dan berfungsi sebagai pusat rujukan. Rumah Sakit harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan harapanpelanggan untuk meningkatkan kepuasan pemakai jasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 29 huruf bmenyebutkan bahwa rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yangaman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakankepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.Rumah Sakit menurut Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit yang dimiliki pemerintah merupakan salah satu organisasi sektor publik yang digunakan sebagai unit kerja pemerintah

untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang kesehatan. Organisasi sektor publik mempunyai tujuan utama bukan memperoleh laba (*non profit oriented*).

Peran Rumah Sakit Pemerintah ini menjadi sangat penting, karena fungsinya tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri banyak sekali permasalahan yang muncul seiring dengan tuntutan dari masyarakat yang menginginkan pemerintah untuk mampu menyediakan pelayanan prima (Candrasari 2018:94).

Semakin banyaknya penilaian pada pelayanan yang kurang baik pada Rumah Sakit Pemerintah jika dibandingkan dengan Rumah Sakit Swasta.Persaingan dari Rumah Sakit Swasta, rendahnya komitmen dan kompetensi SDM, penampilan, budaya kerja dan perilaku yang tidak mendukung telah menciptakan *brand image* yang buruk bagi rumah sakit pemerintah.

Kondisi ini tidak diharapkan terjadi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Secara perlahan terjadi peningkatan mutu pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, ditandai oleh kenaikan tingkat kunjungan di masing-masing unit layanan. Keadaan tersebut membuat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram mampu bersaing, baik dengan Rumah Sakit pemerintah maupun Rumah Sakit Swasta lainnya yang ada di Kota Mataram. RSUD Kota Mataram juga meningkatkan pelayanan agar mampu tetap bersaing dengan menjadikan RSUD sebagai pusat pendidikan dan penelitian yang berstandar nasional dan internasional sehingga derajat kesehatan masyarakat terus meningkat.

B. VISI DAN MISI

1. VISI

Adapun Visi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram yakni "*Rumah Sakit Pilihan Masyarakat dalam bidang Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Penelitian yang berstandar internasional* "

2. MISI.

Sedangkan Misi yang dijalankan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, yakni:

a. Memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, berkualitas dan profesional;
b. Melaksanakan pendidikan dan penelitian kesehatan yang berkelanjutan dan berkualitas;
c. Meningkatkan kompetensi SDM yang berdaya saing;
d. Meningkatkan kesejahteraan karyawan/karyawati;
e. Meningkatkan sarana prasarana sesuai standar RS Pendidikan dan kemajuan IPTEKDOK.

C. MAKSUD DAN TUJUAN RUMAH SAKIT

Pada garis besarnya, acuan yang digunakan untuk merumuskan maksud dantujuanRumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait.

Adapun maksud tujuan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataramadalah:

1. Maksud.

Adapun maksud keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram adalah memberikan Pelayanan Kesehatan secara paripurna kepada segenap lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, ras dan agama atau kepercayaan serta menjadi pusat pendidikan kesehatan.

2. Tujuan.

Sedangkan tujuan keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, adalah :

a. Menjadi rumah sakit rujukan utama di Wilayah Nusa Tenggara Barat yang berstandar internasional;

b. Menciptakan kepuasan bagi semua pasien dan karyawan di Rumah sakit Umum Daerah Kota Mataram;
c. Menjadi pusat pendidikan kesehatan yang menciptakan tenaga-tenaga kesehatan berkualitas, professional dan berdaya saing;
d. Menjadi pusat penelitian untuk penemuan-penemuan baru bidang kesehatan yang berguna bagi seluruh masyarakat;
e. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, beretika dan professional.

D. KEGIATAN DAN PRODUK PELAYANAN.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka RSUD Kota Mataram melaksanakan kegiatan rutin memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat antara lain:

1. Bidang Pelayanan Medik, meliputi:

a. Layanan Rawat JalanPagi:
- Poliklinik Ekskutif;
- Poliklinik Penerbangan;
- Poliklinik Bedah;
- Poliklinik Bedah Tulang;
- Poliklinik Obgyn;
- Poliklinik Penyakit Dalam;
- Poliklinik Anak;
- Poliklinik Bedah Anak;
- Poliklinik Saraf;
- Poliklinik Bedah Saraf;
- Poliklinik Kulit dan Kelamin;
- Poliklinik Mata;
- Poliklinik THT;
- Poliklinik Rehabilitasi Medik dan Fisioterapi;
- Poliklinik Gigi Umum dan Spesialis;
- Poliklinik Gizi;
- Poliklinik Jantung;
- Poliklinik Paru;

- Poliklinik Jiwa dan Adiksi;
- Poliklinik Urologi;
- Poliklinik Andrologi;
- Poliklinik Geriatri;
- Poliklinik Respirasi (Covid-19).

b. Layanan Rawat Jalan Sore:
   - Poliklinik Penyakit Dalam;
   - Poliklinik Kandungan dan Kebidanan;
   - Poliklinik Anak;
   - Poliklinik Bedah Tulang;
   - Poliklinik Mata;
   - Poliklinik Penerbangan;
   - Poliklinik Jantung;
   - Poliklinik THT;
   - Poliklinik Saraf;
   - Poliklinik Bedah Anak;
   - Poliklinik Gigi Spesialis;
   - Poliklinik Kulit dan Kelamin.

c. Layanan Rawat Inap:
   - Kelas VIP dan Paviliun Graha Mentaram; dan
   - Kelas I A, 1B, II dan IIIA, IIIB, IIIC, Isolasi Covid 19, Isolasi TBC, Isolasi penyakit imunocopromise (HIV/AIDS).

d. Layanan IGD Terintegrasi 24 jam, Pelayanan Ambulans dan PSC 119 MEMS (Mataram Emergency Medical Service).
e. ICU/ICCU/NICU/PICU.
f. Stroke Center.
g. Pelayanan Jantung Terpadu (PJT)/Intermedite.
h. Instalasi Bedah Sentral (IBS).
i. Ruang Bersalin dan Nifas.
j. Hemodalisa Center (HD).
k. Terapi Hiperbaric Chamber.
l. Kateter Jantung dan Angiografi (Cathlab).

m. MCU (Medical Check Up).
n. Pelayanan Medical Tourism/ wisata Medis.

2. Bidang Pelayanan Penunjang, meliputi:

a. Farmasi.
b. Laboratorium.
c. Radiologi.
d. Instalasi Gizi.
e. Instalasi Kesehatan Lingkungan.
f. BDRS (Bank Darah Rumah Sakit).
g. MRI dan CT Scan.
h. Pelayanan Gizi.
i. Pelayanan CSSD.
j. Kamar Jenazah/ Rumah Duka.
k. Instalasi Perawatan Sarana Rumah Sakit (IPRS).
l. Pelayanan ArtisCantik (Antar Obat Gratis cepat akurat dan Simpatik)
m. Pelayanan Permaisuri Dancing (Persalinan Aman, Bayi Sehat, Ibu Berseridengan ANC rutin USG).
n. Pelayanan Rekam Medik Elektronik.
o. Pelayanan Pendekar Serasi (Penanganan Dini, Emergency, Kuratif, Rehabilitasi Stroke Terintegrasi).
p. Pelayanan Maharestu (Mataram Harum Rendah Stunting)

3. Bidang Pelayanan Keperawatan.

a. Pelayanan Home Care.

4. Bagian Umum dan Kepegawaian:

a. Pelayanan Diklat dan Pendidikan.

E. PRINSIP-PRINSIP DASAR.

Praktek tata kelola rumah sakit yang baik adalah beroperasinya rumah sakit sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tata kelola rumah sakit. Menurut Meeta Ruparel dalam tulisannya "*Hospital Good Governance*" menyebutkan, ada 5 (lima) elemen kunci dari tata kelola yang baik di

rumah sakit yaitu: 1).*Accountability*; 2).*Fairness dan Ethic*; 3).*Safety*; 4).*Transparancy*, dan 5).*Professional*.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram memiliki Budaya Kerja yang merupakan pedoman bagi seluruh elemen terkait di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram.Budaya Kerja yang dianut oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram yaitu:

1. **Akuntabilitas**

   Bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik.

2. **Kebersamaan.**
   a. Menyadari bahwa dalam semua pekerjaan, kerjasama tim merupakan faktor terpenting dalam pelayanan untuk pencapaian kepuasan pelanggan.
   b. Mengutamakan kepentingan rumah sakit daripada kepentingan golongan, kelompok/pribadi.

3. **Profesionalisme.**
   a. Bekerja sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
   b. Bersedia melakukan pekerjaan yang penuh tanggung jawab.
   c. Memiliki keyakinan atas kemampuan sendiri (kemandirian).
   d. Berusaha meningkatkan kemampuan secara aktif mengikuti dan mempelajari perkembangan ilmu dan teknologi agar dapat memberikan yang terbaik bagi Rumah Sakit.
   e. Memegang teguh rahasia jabatan.

4. **Kejujuran.**
   a. Senantiasa menjunjung tinggi kejujuran dengan berani menyatakan kebenaran dan kesalahan berdasarkan dan dan fakta yang ada secara proporsional.
   b. Transparan dan akuntabel dalam menjalankan sistem kerja.

5. Keterbukaan.

a. Terbuka dalam mengemukakan dan menerima, menghargai serta menghormati pendapatan orang lain dengan lapang dada.
b. Mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan yang terjadi.

6. Disiplin.

a. Selalu menegakkan disiplin terhadap diri sendiri, lingkungan kerja dan mentaati peraturan yang berlaku.
b. Memiliki kesungguhan kerja dalam melaksanakan tugas.

F. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA.

1. Pejabat Pengelola BLUD

Susunan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram adalah sebagai berikut:

- Pemimpin BLUD : dr. Hj. Ni Ketut Eka Nurhayati, Sp.OG.,Subsp.F.E.R.,M.Kes.,M.Sc
- Pengelola Teknis BLUD : -
- Pengelola Keuangan BLUD : -

2. Dewan Pengawas.

Sedangkan Susunan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, adalah sebagai berikut:

- Ketua : dr. H. Usman Hadi.
- Anggota : - H. Moh. Syakirin Hukmi, SE. MM.
  - H. Masbuhin,S.IP.

BAB II
KINERJA BLUD TAHUN ANGGARAN BERJALAN

A. KONDISI LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN KINERJA

1. Faktor Internal.

a. Pelayanan Medis.

Dalam kegiatan operasional, RSUD Kota Mataram telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, baik pasien umummaupun Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelayanan dan fasilitas kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, meliputi:

1). Pelayanan IGD 24jam Terintegrasi dan Mataram Emergency Medical Service (MEMS)
2). Pelayanan Rawat Inap Kls I, II, dan III
3). Pelayanan Rawat Inap Kls VIP dan Paviliun
4). Pelayanan Rawat Jalan pagi-sore dan Eksekutif
5). Pelayanan Kamar Operasi
6). Pelayanan Radiologi
7). Pelayanan Laboratorium
8). Farmasi/Apotek 24 jam
9). Pelayanan ICU, ICU Covid/ICCU/Pelayanan Jantung Terpadu (Intermediet)
10). Pelayanan NICU/PICU
11). Pelayanan Ruang Bersalin dan Nifas
12). Pelayanan Hemodialisa
13). Pelayanan MRI Dan CT Scan
14). Pelayanan Gizi
15). Pelayanan Ambulans/Jenazah
16). Stoke Center
17). Pelayanan Farmasi/Antar Obat Gratis
18). Pelayanan Bank Darah
19). Pelayanan CSSD
20). Pelayanan Terapi Hiperbaric Chamber

21). Pelayanan Cathlab
22). Pelayanan Inseminasi (*Intrauterine Insemination*)
23). Rumah Duka/Kamar Jenazah
24). Pelayanan Diklat/Pendidikan.
25). Pelayanan home Care
26). Pelayanan Medical Tourism/Wisata Medis
27). Pelayanan Artis Cantik (Antar Obat Gratis cepat akurat dan Simpatik)
28). Pelayanan Permaisuri Dancing (Persalinan Aman Bayi Sehat Ibu Berseri dengan ANC rutin USG)
29). Pelayanan Pendekar Serasi (Penanganan Dini, Emergency, Kuratif, Rehabilitasi Stroke Terintegrasi)
30). Pelayanan Maharestu (Mataram Harum Rendah Stunting)

b. Keuangan.

Asumsi Keuangan:

1). Prediksi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp.160.000.000.000 dan proyeksi perubahan pendapatan tahun 2023 sudah ditetapkan dari pemerintah daerah sebesar Rp.180.000.000.000
2). Pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
3). Biaya pegawai PNS masih disubsidi kecuali non PNS disubsidi 5 bulan
4). Masih dimungkinkan subsidi investasi dari pemerintah daerah dan pusat.

c. Organisasi dan SDM.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Mataram.Mulai operasional dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sejak bulan Maret Tahun 2010, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1225/MENKES/SK/VIII/2010 Tanggal 27 Agustus 2010 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013, Rumah Sakit

Umum Daerah Kota Mataram menjadi Rumah Sakit Kelas B.

Struktur Organisasi:

Adapun Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, terdiri dari:

1). Direktur	: dr. Hj. NK Eka Nurhayati., Sp.O.G., Subsp., F.E.R., M.Kes., M.Sc
2). Wadir Bidang Umum dan Keuangan	: drg. Dianita Rahmi
3). Wadir Bidang Pelayanan	: dr.H. Tris Cahyoso., MARS
4). Kepala Bagian Program, Humas dan Rekam Medik	: Lalu Ery Setiawan., SE
5). Kepala Bagian Keuangan	: Khaerul Hamdi, SE.,M.Ak
6). Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan	: Lalu Budiawan., SKM.,MM
7). Kepala Bidang Pelayanan Medik	: dr. Suwondo Ariyanto, Sp.JP,.FIHA
8). Kepala Bagian Umum	: Srianingsih., SST., M.Kes
9). Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik	: Fatwadi., S.Si., M.Ak
10). Perencana	: Putu Widhi Sudariani., S.Kep., Ns., M.Kep
11). Analis Keuangan Pusat dan Daerah	: Baiq Suriayani., SIP
12). Administrator Kesehatan	: Afrina Susiarty., SST.,MM
13). Analis Kepegawaian	: Baiq Sukmawati., SE., MM
14). Administrator Kesehatan	: Dewi Ekawati,S.IP
15). Administrator Kesehatan	: Lalu Dedi Hidayat., S.Kep
16). Administrator Kesehatan	: Fafir Rahmah., S.Si., Apt
17). Administrator Kesehatan	: drg. Rina Yulia Wulandari
18). Analis Keuangan Pusat	: Susiana Hastuti., SKM., MM

dan Daerah

19). Perencana : Astuti Sastrawati., SST

20). Pranata Kehumasan : Yuda Prasetya., S.Kep., Ns

21). Administrator Kesehatan : Zakaria Ahmad Ezis., SKM

22). Administrator Kesehatan : dr. Ni Wayan Suanita Kusumawardani

23). Kelompok Jabatan Fungsional dan Instalasi

SDM RSUD Kota Mataram.

Adapun SDM Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, seperti pada Tabel 2.1. berikut.

Tabel 2.1. Jumlah Tenaga Kesehatan/Non Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram Tahun 2023

Rekapitulasi Pegawai PNS dan Non PNS
RSUD Kota Mataram Per Oktober 2023

No.	Jabatan	2023				Jumlah	Ket
		PNS	P3K	Non PNS	Mitra		
1	Direksi	22				22	
2	Dokter Spesialis	**36**	**4**	**12**	**8**	**60**	
	Obgyn	2		1		3	
	Penyakit Dalam	5		1		6	
	Bedah	4		1		5	
	Anak	3		2		5	
	Radiologi	2	1			3	
	Rehabilats Medik	1		1		2	
	Anestesi	2	1			3	
	Mata	2				2	
	Jantung	2		1	2	5	
	Patoligi Klinik	1		1		2	
	Patologi Anatomi	1		1		2	
	Urologi				1	1	
	Bedah Anak		1			1	
	Bedah Saraf				1	1	
	Orthopedi	2		1		3	
	Emergency Medicine				1	1	
	Gizi Klinik	1				1	
	Paru	1		1		2	
	Jiwa	1				1	

	Kulit dan Kelamin	1				1	
	THT	3				3	
	Andrologi				1	1	
	Saraf	2	1			3	
	Kesehatan Penerbangan				1	1	
	Forensik				1	1	
	Akupuntur			1		1	
3	Dokter Gigi Spesialis	**2**		**2**		**4**	
	Spesialis Penyakit Mulut	1				1	
	Spesialis Bedah Mulut			1		1	
	Spesialis Peridonsia	1				1	
	Spesialis Konservasi Gigi			1		1	
	Total Dokter Spesialis						
4	Dokter Umum	**20**	**3**	**47**		**70**	
5	Dokter Gigi Umum	**6**		**1**		**7**	
6	Perawat	**88**	**3**	**280**		**371**	
7	Terapis Gigi dan Mulut	**10**		**2**		**12**	
8	Ortotis Protetis	**2**				**2**	
9	Refraksionis Optisien	**3**				**3**	
10	Penata Anestesi	**3**				**3**	
11	Asisten Penata Anestesi	**8**		**3**		**11**	
12	Bidan	**25**	**1**	**60**		**86**	
13	Perekam Medis	**7**	**1**	**17**		**25**	
14	Fisioterapis	**6**	**2**	**9**		**17**	
15	Okupasi terapi	**3**		**1**		**4**	
16	Terapis Wicara	**3**		**1**		**4**	
17	Laboratorium						
	- Analis Kesehatan	**14**		**31**		**45**	
	- Teknisi Pelayanan Darah	**1**		**3**		**4**	
18	Nutrisionis	**13**	**1**	**7**		**21**	
19	Radiografer	**6**		**7**		**13**	
20	Apoteker	**8**	**1**	**15**		**24**	
21	Asisten Apoteker	**14**	**1**	**34**		**49**	

22	Teknisi Elektro Medis	**5**				**5**	
23	Sanitarian	**5**		**1**		**6**	
24	Pramusaji			**25**		**25**	
25	Administrator Kesehatan					**0**	
26	Administrator SIMRS			**1**		**1**	
27	Design Grafis			**1**		**1**	
28	Front Office			**7**		**7**	
29	Pengadministrasi Farmasi			**1**		**1**	
30	Pengadministrasi Pendaftaran			**8**		**8**	
31	Pengadministrasi SIMRS			**6**		**6**	
32	Pengadministrasi Umum	**33**		**146**		**179**	
33	Pengadministrasi Umum dan Pembantu Kasir Penerima			**14**		**14**	
34	Pengadministrasi Umum Kepegawaian			**5**		**5**	
35	Pengadministrasi Umum Keuangan			**3**		**3**	
36	Petugas Sterilisasi (CSSD)			**17**		**17**	
37	Programer			**2**		**2**	
38	Satpam			**21**		**21**	
39	Sopir			**18**		**18**	
40	Transpoter			**27**		**27**	
41	Tenaga Teknisi Umum			**11**		**11**	
Jumlah		**343**	**17**	**846**	**8**	**1214**	

d. Sarana dan Prasarana.

1. Status Kepemilikan : Pemerintah Kota Mataram
2. Kelas Rumah Sakit : B
3. Luas Tanah : 24.083 m^2
4. Luas Bangunan : 20.815 m^2
5. Fasilitas listrik KVA/Megawatt : PLN sebanyak 1700

6. Fasilitas listrik Diesel	:	1850 KVA
7. Fasilitas air	:	PDAM dan Pompa Bor Air Tanah
8. Fasilitas gas	:	Sentral Oksigen (O_2) Kapasitas13 Ton
9. Fasilitas pengolahan limbah	:	IPAL Kapasitas 200 m^3, Incenerator 1 bh
10. Komunikasi	:	PABX
11. Tata Udara	:	AC Central
12. Peralatan	:	Medik, Non Medik
13. Transportasi	:	- Ambulans 4 unit. - Mobil Jenazah 5 unit. - MobilDinas Operasional 7 unit. - Sepeda Motor 10 unit.

2. Faktor Eksternal.

a. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan BLUD.

1). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;

2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3). Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaan Daerah;

5). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah;

6). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

8). Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

9). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11). Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram;

12). Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah Kota Mataram;

13). Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;

14). Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum daerah Kelas B Kota Mataram;

15). Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Umum Layanan Daerah (BLUD).

b. Kebijakan Pemerintah untuk Rumah Sakit

Kebijakan Pemerintah terkait subsidi terhadap Rumah Sakit berupa dukungan dari pemerintah Kota Mataram Tahun 2023. Anggaran BLUD ABT sebesar Rp 20.000.000.000,-. APBD untuk Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Kesehatan sebesar Rp.3.000.000.000,- dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.3.280.604.320,- yang dianggarkan untuk belanja pegawai PPPK. Pembiayaan DBHCHT dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 0,-. Sedangkan dana silpa 2022 sebesar Rp.9.267.732.649,93. Total Anggaran Belanja Tahun Perubahan menjadi Rp.35.548.336.969,93**.** Sedangkan Kebijakan Pemerintah terkait SDM/PNS berupa Pegawai Negri Sipil (PNS) Kota Mataram sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan Kota Mataram, Tahun 2023 didukung oleh 5.170 orang pegawai negeri sipil. Tahun 2023

Rumah Sakit Kota Mataram terdapat tambahan tenaga PPPK sebanyak 17 Orang.

c. Keadaan Persaingan.

Dalam strategi bersaing Rumah Sakit Umum Kota Mataram berusaha untuk menjadi Rumah Sakit yang ramah, profesional, unggulan dan menjadi pilihanutama bagi masyarakat kota Mataram dan sekitarnya. Strategi bersaing penentuan posisi suatu usaha bertujuan untuk memaksimalkan nilai kemampuan yang memberdayakan dengan pesaing.

Dilihat dari posisi lokasi Rumah Sakit Umum Kota Mataram menempati lokasi yang sangat strategis, mudah dijangkau dari berbagai arah dan hal ini merupakan modal dasar yang sangat besar.

Tingkat fasilitas diantara pesaing, Rumah Sakit Umum Kota Mataram berupaya dengan meningkatkan mutu pelayanan untuk menuju pelayanan prima. Beberapa rumah sakit yang menjadi pesaing adalah Rumah Sakit Umum Provinsi, Rumah Sakit Islam, Rumah Sakit Risa Medika, Rumah Sakit Umum Bhayangkara, Rumah Sakit Biomedika, Rumah Sakit TNI AD dan Rumah Sakit Karang Ujung, Rumah Sakit Harapan Keluarga, Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit Universitas Mataram (UNRAM), Rumah Sakit Permata Hati selain RSUP semuanya merupakan rumah sakit swasta dan rumah sakit milik Polri, TNI dan Universitas Mataram.

d. Globalisasi Ekonomi.

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi berada pada angka 3,69%. Kemudian di tahun 2022 menjadi 5,72%. Pada tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03%, sedangkan untuk laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022 sebesar 7,10%. Perekonomian NTB pada triwulan I 2023

tercatat mengalami pertumbuhan 3,57%, melandai bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2022.

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Mataram terhadap pembentukan PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tahun 2022 mencapai 7,76%. Peningkatan tekanan inflasi triwulan II 2022 terjadi baik di Kota Mataram tercatat sebesar 5,52% dan 4,85%, meningkat dibandingkan triwulan I 2022 yang masing-masing 2,46% dan 2,63%. Tekanan inflasi pada triwulan I 2023 diperkirakan berpotensi di atas rentang target inflasi ditargetkan berada di kisaran 2% hingga 4%.

e. Perkembangan sosial-budaya dan tingkat pendidikan masyarakat

Kota Mataram terbentuk pada tanggal 31 Agustus 1999, dengan luas wilayah 60.3 km2 dan yang terbagi atas 6 Kecamatan. Selain merupakan Ibukota Provinsi NTB, Kota Mataram juga sebagai Pusat Pemerintahan, Pusat Pendidikan dan Pusat Perekonomian barang dan jasa. Penyebaran penduduk di Kota Mataram menunjukkan penduduk usia muda 0-24 tahun sebesar 49,99%, kelompok usia 25-59 tahun sebesar 43,41% dan 60 tahun keatas sebesar 6,9%.

Kondisi lainnya menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari jumlah penduduk perempuan. Dalam bidang pendidikan,tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tertinggi terdapat di tingkat SD/MI yaitu107,45 % dan yang terendah di tingkat SMA/MA/SMK yaitu 75,46 %. Angka Partisipasi Murni (APM) tertinggi terdapat di tingkat SD/MI yaitu 95,86 % dan terendah di tingkat SMA/MA/SMK yaitu 71,32 %.

f. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menunjukkan jati dirinya dalam peradaban manusia dewasa ini. Peran perkembangan teknologi informasi telah memberikan share

yang signifikan terhadap nilai tambah eknomi. Efisiensi dalam berbagai bidang, khusunya dalam masalah waktu, tenaga dan biaya melalui kecepatan dan ketepatan informasi.

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menjangkau seluruh penjuru tanah air, bahkan mancanegara, maka penggunaan jasa dan fasilitas informasi dan telekominikasi ditingkatkan sebagai peluang usaha bagi masyarakat dan pemerintah. Sehingga pada saatnya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Khususnya dalam bidang pemerintahan, E-government mengacu pada penggunaan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Pada intinya e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihakpihak lain.

B. PERBANDINGAN ASUMSI PADA WAKTU MENYUSUN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN DENGAN FAKTA YANG TEJADI

Berikut perbandingan antara asumsi makro dan mikro dengan realisasi secara kuantitatif.

1. ASPEK MAKRO

Perbandingan asumsi dari aspek makro seperti yang dijelaskan melalui Tabel 2.2. berikut.

Tabel 2.2. Asumsi dari Aspek Makro

NO.	UNSUR	ASUMSI 2023	PROGNOSA 2022	Ket
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	6,5 %	6 %	-
2.	Tingkat Inflasi (%)	4-5 %	10 %	-
3.	Pertumbuhan Pasar (%)	30%	30%	-
4.	Tingkat Suku Bunga Pinjaman (%)	11%	11%	-
5.	Kurs 1 US$ (Rp)	14.958	15.260	-

2. ASPEK MIKRO.

Perbandingan asumsi dari aspek mikro seperti yang dijelaskan melalui Tabel 2.3. berikut.

Tabel 2.3. Asumsi dari Aspek Mikro

NO.	UNSUR	ASUMSI 2023	PROGNOSA 2022	Ket
1.	Pembiayaan public sebagai fungsi *PSO (APBD & APBN)*	-	-	-
2.	Perubahan tarif layanan	Ada	Ada	-
3.	Pengembangan produk baru	Ada	Ada	-
4.	Peningkatan volume layanan	Ada	Ada	-
5.	Asumsi-asumsi dalam analisis rasio keuangan Perputaran piutang Perputaran persediaan	-	-	-

C. PENCAPAIAN KINERJA.

1. NON KEUANGAN.

a. Pelayanan (berdasarkan unit).

Pencapaian kinerja dari aspek pelayanan (berdasarkan unit) seperti yang dijelaskan melalui Tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.4. Pencapaian kinerja dari aspek pelayanan (berdasarkan unit)

NO.	UNIT PELAYANAN	SATUAN	KINERJA PELAYANAN TAHUN 2023		KET.
			TARGET	REALISASI	
1.	Instalasi Gawat Darurat	org	101.014	101.291	
2.	Instalasi Rawat Jalan	org	198.976	184.305	
3.	Instalasi Rawat Inap	org	19.355	14.754	
	Jumlah		**319.345**	**300.350**	

b. Pendukung Pelayanan.

Pencapaian kinerja dari aspek Pendukung Pelayanan (berdasarkan unit) seperti yang dijelaskan melalui Tabel 2.5. berikut.

Tabel 2.5. Pencapaian kinerja dari aspek Pendukung Pelayanan (berdasarkan unit)

NO.	KEL. PELAYANAN	SATUAN	KINERJA PELAYANAN TAHUN 2023			KET.
			Target	Realisasi	Prognosa	
1.	Kunjungan Rwt Jalan	Org	198.976	184.305	14.671	-
2.	Kunjungan IGD	Org	101.014	101.291	(277)	**sesuai target**
3.	Pasien Rawat Inap	Org	19.355	14.754	4.601	-
4.	B O R	%	75	55.82%	19.18%	-
5.	L O S	Hari	6	4	2	-
6.	T O I	Hari	3	2.44	0.56	-

2. KEUANGAN.

a. Pendapatan Berdasarkan Jenis Pelayanan.

Pencapaian kinerja dari aspek pendapatan berdasarkan jenis pelayanan, seperti yang dijelaskan melalui Tabel 2.6. berikut.

Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Dari Aspek Pendapatan 2023 Berdasarkan Jenis Pelayanan

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2023	JUMLAH REALISASI BULAN INI	JUMLAH REALISASI S/D BULAN LALU	JUMLAH REALISASI s/d BULAN INI	SISA ANGGARAN LEBIH/KURANG	%
1	2	3	5	6	7	8	9
4	**PENDAPATAN**						
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**180,000,000,000.00**	**21,339,262,593.88**	**209,561,569,699.19**	**230,900,832,293.07**	**(50,900,832,293.07)**	**128.28%**
4.1.1.	**PENERIMAAN RUMAH SAKIT UMUM**	**180,000,000,000.00**	**21,339,262,593.88**	**209,561,569,699.19**	**230,900,832,293.07**	**(50,900,832,293.07)**	**128.28%**
1	Penerimaan Pelayanan Pasien Umum	10,500,000,000.00	1,915,960,144.91	16,180,534,572.53	18,096,494,717.44	(7,596,494,717.44)	172.35%
2	Penerimaan Pelayanan dari Jaminan	165,157,000,000.00	18,405,947,128.00	189,495,984,960.00	207,901,932,088.00	(42,744,932,088.00)	125.88%
3	Penerimaan Pelayanan pasien tidak mampu	3,600,000,000.00	986,479,766.00	2,678,970,599.00	3,665,450,365.00	(65,450,365.00)	101.82%
4	Lain lain Pendapatan RSU yang syah	743,000,000.00	30,875,554.97	1,206,079,567.66	1,236,955,122.63	(493,955,122.63)	166.48%
	Jumlah Pendapatan	180,000,000,000.00	21,339,262,593.88	209,561,569,699.19	230,900,832,293.07	(50,900,832,293.07)	128.28%
5	Pendapatan temuan Audit bepeka			101,301,000.00	101,301,000.00		
	JUMLAH PENDAPATAN	**180,000,000,000.00**	**21,339,262,593.88**	**209,662,870,699.19**	**231,002,133,293.07**	**(50,900,832,293.07)**	**128.33%**

b. Biaya Berdasarkan Jenis Layanan.

Pencapaian kinerja dari aspek biaya berdasarkan jenis layanan, seperti yang dijelaskan melalui Tabel 2.7. berikut.

Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Dari Aspek Biaya Per Desember 2023 Berdasarkan Jenis Pelayanan

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Prognosa Selisih Lebih/Kurang	%
I	**BIAYA OPERASIONAL**	**164,318,335,583**	**210,563,502,114.14**	**(46,245,166,531.14)**	**1.28**
A.	**Biaya Pelayanan**	**144,718,335,583**	**171,071,890,702.00**	**(26,353,555,119.00)**	**1.18**
	1. Biaya Pegawai	15,232,736,844	6,533,631,926	8,699,104,918.00	**0.43**
	2. Biaya Bahan	45,030,000,000	68,052,099,819	(23,022,099,819.00)	**1.51**
	3. Biaya Jasa Pelayanan	69,505,598,739	79,199,077,891	(9,693,479,152.00)	**1.14**
	4. Biaya Jasa Pemeliharaan	1,050,000,000	1,444,225,430	(394,225,430.00)	**1.38**
	5. Biaya Barang dan Jasa	13,400,000,000	14,733,502,811	(1,333,502,811.00)	**1.10**
	6. Biaya Lain-Lain	500,000,000	1,109,352,825	(609,352,825.00)	**2.22**
B.	**Biaya Umum dan Adminsitrasi**	**19,600,000,000**	**39,491,611,412**	**(19,891,611,412.14)**	**2.01**
	1. Biaya Pegawai	2,200,000,000	2,978,326,335	(778,326,335.00)	**1.35**
	2. Biaya Administrasi Kantor	1,975,000,000	1,791,128,075	183,871,925.00	**0.91**
	3. Biaya Pemeliharaan	2,500,000,000	7,651,527,872	(5,151,527,872.00)	**3.06**
	4. Biaya Barang dan Jasa	10,775,000,000	24,152,393,843	(13,377,393,843.00)	**2.24**
	5. Biaya Promosi	300,000,000	396,433,354	(96,433,354.00)	**1.32**
	6. Biaya Umum dan Administrasi	350,000,000	216,002,500	133,997,500.00	**0.62**
	7. Biaya Lain-Lain	1,500,000,000	2,305,799,433	(805,799,433.14)	**1.54**
II	**BIAYA MODAL**	**24,949,397,067**	**12,515,925,842**	**12,433,471,225.00**	**0.50**
	1. Tanah	-	-	**-**	
	2. Bangunan	12,313,739,096	4,655,529,257	7,658,209,839.00	**0.38**
	3. Peralatan, Mesin dan Kendaraan	11,510,117,971	7,860,396,585	3,649,721,386.00	**0.68**
	4. Instalasi, Jalan, Jaringan dan Irigasi	1,125,540,000	-	1,125,540,000.00	**-**
	5. Sarana dan prasarana	-	-	**-**	
	Jumlah (I+II)	**189,267,732,650**	**223,079,427,956.14**	**(33,811,695,306.14)**	**1.18**
III	**PENGELUARAN PENDANAAN/PEMBIAYAAN**	-	-	**-**	**-**
	1. Hutang Pokok	-	-	**-**	**-**
	2. Bunga dan Administrasi	-	-	**-**	**-**
	3. Komisi, Provisi, denda	-	-	-	-
	JUMLAH (I+II+III)	**189,267,732,650**	**223,079,427,956.14**	**(33,811,695,306.14)**	**1.18**

c. Pencapaian Program Investasi (Biaya Modal).

Pencapaian Program Investasi (Biaya Modal) RSUD Kota Mataram, seperti yang dijelaskan melalui Tabel 2.8. berikut.

Tabel 2.8. Pencapaian Program Investasi (Biaya Modal)
RSUD Kota Mataram.

NO.	URAIAN	RINCIAN BIAYA		JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)
		Volume	Satuan		
II.	**BIAYA MODAL**			**24.949.397.067**	**12,515,925,842**
	1. Tanah	1	Tahun	0	0
	2. Bangunan	1	Tahun	12.313.739.096	4,655,529,257
	3. Peralatan, Mesin & Kendaraan	1	Tahun	11.510.117.971	7,860,396,585
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	1	Tahun	1.125.540.000	0
	5. Sarana dan prasarana	1	Tahun	0	0

d. Pencapaian Program Pendanaan/Pembiayaan

Pencapaian Program Pendanaan/Pembiayaan RSUD Kota Mataram, seperti yang dijelaskan melalui Tabel 2.9. berikut.

Tabel 2.9. Pencapaian Program Pendanaan/Pembiayaan
RSUD Kota Mataram.

NO.	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp.)
		Volume	*Satuan*	*Harga Satuan (Rp.)*	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Pembiayaan/Pengeluaran				
1.	Pembayaran Pokok Pinjaman per September 2023	1	Thn	0	0
1.1	**Biaya keterlambatan pembayaran klaim BPJS**				**0**
	***a. Pembayaran Jasa Pelayanan* (BPJS, BANSOS, ASURANSI LAINNYA, DAN UMUM)**				***36,929,580,983***
	Pembayaran Jasa layanan bulan Januari	1	bln	5,917,173,857	
	Pembayaran Jasa layanan bulan Februari	1	bln	5,814,995,760	
	Pembayaran Jasa layanan bulan maret	1	bln	6,258,127,241	
	Pembayaran Jasa layanan bulan April	1	bln	5,508,781,268	
	Pembayaran Jasa layanan bulan Mei	1	bln	6,882,842,875	
	Pembayaran Jasa layanan bulan Juni	1	bln	6,547,659,982	

	b.Pembayaran Bunga dan Administrasi	1	bln		**0**
	c .Pembayaran Admin dan Provisi	1	bln	0	**0**
	d. Pembayaran Komisi,provisi,denda,Adm	1	bln	0	**0**

D. LAPORAN KEUANGAN TAHUN BERJALAN.

1. NERACA.

Kondisi Neraca Tahun Berjalan RSUD Kota Mataram dapat dijelaskan melalui data pada Tabel 2.10 berikut.

Tabel 2.10. Neraca RSUD Kota Mataram
Per 30 Juni 2023

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	2	3	4
1	**ASET**	**454.641.299.046,27**	**458.683.243.814,11**
1.1	**ASET LANCAR**	**59.672.449.212,53**	**65.503.947.557,37**
1.1.01	Kas dan Setara Kas	26.955.664.094,09	9.267.732.649,93
1.1.01.04	Kas di BLUD	26.955.664.094,09	9.267.732.649,93
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	23.183.966.463,25	44.447.663.639,25
1.1.06.16	Piutang Pendapatan BLUD	23.183.966.463,25	44.447.663.639,25
1.1.10	Penyisihan Piutang	(11.111.915.909,81)	(11.111.915.909,81)
1.1.10.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	(11.111.915.909,81)	(11.111.915.909,81)
1.1.12	Persediaan	20.644.734.565,00	22.900.467.178,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	20.644.734.565,00	22.900.467.178,00
	JUMLAH ASET LANCAR	**59.672.449.212,53**	**65.503.947.557,37**
		0,00	**0,00**
1.3	**ASET TETAP**	**341.156.524.052,10**	**339.366.970.475,10**
1.3.01	Tanah	23.841.232.808,00	23.841.232.808,00
1.3.01.01	Tanah	23.841.232.808,00	23.841.232.808,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	383.127.166.090,87	382.576.206.770,87
1.3.02.01	Alat Besar	3.716.917.526,00	3.716.917.526,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	4.086.809.548,59	4.086.809.548,59
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	364.664.320,00	364.664.320,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	213.045.500,00	213.045.500,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	42.440.084.512,19	42.094.007.012,19
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.637.924.145,00	1.637.924.145,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	323.248.340.316,09	323.043.458.496,09
1.3.02.08	Alat Laboratorium	3.012.169.550,00	3.012.169.550,00
1.3.02.10	Komputer	4.134.746.523,00	4.134.746.523,00
1.3.02.11	Alat Eksplorasi	272.464.150,00	272.464.150,00

1.3.03	Gedung dan Bangunan	185.939.549.705,07	184.700.955.448,07
1.3.03.01	Bangunan Gedung	185.939.549.705,07	184.700.955.448,07
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.986.100.601,00	12.986.100.601,00
1.3.04.02	Bangunan Air	745.750.000,00	745.750.000,00
1.3.04.03	Instalasi	5.077.259.798,00	5.077.259.798,00
1.3.04.04	Jaringan	7.163.090.803,00	7.163.090.803,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	240.187.000,00	240.187.000,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	50.000.000,00	50.000.000,00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	190.187.000,00	190.187.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(264.977.712.152,84)	(264.977.712.152,84)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(264.483.734.085,84)	(264.483.734.085,84)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.526.906.259,00	1.526.906.259,00
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(2.020.884.326,00)	(2.020.884.326,00)
	JUMLAH ASET TETAP	**341.156.524.052,10**	**339.366.970.475,10**
		0,00	**0,00**
1.5	**ASET LAINNYA**	**53.812.325.781,64**	**53.812.325.781,64**
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	3.245.292.000,00	3.245.292.000,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	3.245.292.000,00	3.245.292.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	52.949.339.675,64	52.949.339.675,64
1.5.04.01	Aset Lain-lain	52.949.339.675,64	52.949.339.675,64
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.382.305.894,00)	(2.382.305.894,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.382.305.894,00)	(2.382.305.894,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	**53.812.325.781,64**	**53.812.325.781,64**
	JUMLAH ASET	**454.641.299.046,27**	**458.683.243.814,11**
		0,00	**0,00**
2	**KEWAJIBAN**	**47.996.957.817,81**	**47.996.957.817,81**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**47.996.957.817,81**	**47.996.957.817,81**
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	106.666.667,00	106.666.667,00
2.1.05.04	Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa	106.666.667,00	106.666.667,00
2.1.06	Utang Belanja	47.890.291.150,81	47.890.291.150,81
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	1.082.194.737,00	1.082.194.737,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	46.808.096.413,81	46.808.096.413,81
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**47.996.957.817,81**	**47.996.957.817,81**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**47.996.957.817,81**	**47.996.957.817,81**
		0,00	**0,00**
3	**EKUITAS**	**406.644.341.228,46**	**410.686.285.996,30**
3.1	**EKUITAS**	**406.644.341.228,46**	**410.686.285.996,30**
3.1.01	Ekuitas	385.773.370.773,46	366.530.430.034,30
3.1.01.01	Ekuitas	410.686.285.996,15	439.100.397.745,08
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(24.912.915.222,69)	(72.569.967.710,78)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	20.870.970.455,00	44.155.855.962,00
3.1.03.01	RK PPKD	20.870.970.455,00	44.155.855.962,00
	JUMLAH EKUITAS	**406.644.341.228,46**	**410.686.285.996,30**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**454.641.299.046,27**	**458.683.243.814,11**

2. LAPORAN OPERASIONAL.

Laporan Operasional RSUD Kota Mataram Per 30 Juni Tahun 2023 dapat dijelaskan melalui data pada Tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.11. Laporan Operasional RSUD Kota Mataram
Per 30 Juni 2023

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	**PENDAPATAN**	**86.279.683.907,87**	**178.480.541.756,25**	**(92.200.857.848,38)**	**(51,66)**
7.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**	**86.279.683.907,87**	**178.480.541.756,25**	**(92.200.857.848,38)**	**(51,66)**
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	86.279.683.907,87	178.480.541.756,25	(92.200.857.848,38)	(51,66)
7.1.04.16	Pendapatan dari BLUD-LO	86.279.683.907,87	178.480.541.756,25	(92.200.857.848,38)	(51,66)
7.1.04.16.01	Pendapatan dari BLUD-LO	107.543.381.083,87	208.395.772.031,25	(100.852.390.947,38)	(48,39)
7.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	(21.263.697.176,00)	(29.915.230.275,00)	8.651.533.099,00	(28,92)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**86.279.683.907,87**	**178.480.541.756,25**	**(92.200.857.848,38)**	**(51,66)**
	JUMLAH PENDAPATAN	**86.279.683.907,87**	**178.480.541.756,25**	**(92.200.857.848,38)**	**(51,66)**
8	**BEBAN**	**111.192.599.130,56**	**251.050.509.467,03**	**(139.857.910.336,47)**	**(55,71)**
8.1	**BEBAN OPERASI**	**111.192.599.130,56**	**206.399.781.116,48**	**(95.207.181.985,92)**	**(46,13)**
8.1.01	Beban Pegawai	13.451.537.879,00	34.699.089.757,00	(21.247.551.878,00)	(61,23)
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	10.197.188.377,00	14.700.171.340,00	(4.502.982.963,00)	(30,63)
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	8.065.278.700,00	11.540.093.620,00	(3.474.814.920,00)	(30,11)
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	654.761.226,00	998.683.336,00	(343.922.110,00)	(34,44)
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	117.960.000,00	230.830.000,00	(112.870.000,00)	(48,90)
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	655.017.000,00	1.014.285.000,00	(359.268.000,00)	(35,42)
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	197.675.000,00	184.515.000,00	13.160.000,00	7,13
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	491.297.280,00	716.958.000,00	(225.660.720,00)	(31,47)
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.052.027,00	14.622.844,00	429.183,00	2,94
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	147.144,00	183.540,00	(36.396,00)	(19,83)
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.605.747.262,00	4.179.303.803,00	(2.573.556.541,00)	(61,58)
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	449.162.904,00	992.449.521,00	(543.286.617,00)	(54,74)
8.1.01.02.04	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	443.994.692,00	1.698.180.000,00	(1.254.185.308,00)	(73,85)
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	712.589.666,00	1.488.674.282,00	(776.084.616,00)	(52,13)
8.1.01.99	Beban Pegawai BLUD	1.648.602.240,00	15.819.614.614,00	(14.171.012.374,00)	(89,58)
8.1.01.99.99	Beban Pegawai BLUD	1.648.602.240,00	15.819.614.614,00	(14.171.012.374,00)	(89,58)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	97.741.061.251,56	181.300.560.847,86	(83.559.499.596,30)	(46,09)
8.1.02.01	Beban Barang	6.294.367.429,00	13.958.473.504,00	(7.664.106.075,00)	(54,91)
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	6.294.367.429,00	13.958.473.504,00	(7.664.106.075,00)	(54,91)
8.1.02.02	Beban Jasa	5.029.400.000,00	0,00	5.029.400.000,00	100,00
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	5.029.400.000,00	0,00	5.029.400.000,00	100,00
8.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	86.417.293.822,56	167.342.087.343,86	(80.924.793.521,30)	(48,36)
8.1.02.99.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	86.417.293.822,56	167.342.087.343,86	(80.924.793.521,30)	(48,36)
8.1.03	Beban Bunga	0,00	279.763.272,00	(279.763.272,00)	(100,00)
8.1.03.06	Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek	0,00	279.763.272,00	(279.763.272,00)	(100,00)
8.1.03.06.01	Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek	0,00	279.763.272,00	(279.763.272,00)	(100,00)
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	0,00	(9.879.632.760,38)	9.879.632.760,38	(100,00)
8.1.07.04	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	(9.879.632.760,38)	9.879.632.760,38	(100,00)
8.1.07.04.16	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	0,00	(9.879.632.760,38)	9.879.632.760,38	(100,00)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	**111.192.599.130,56**	**206.399.781.116,48**	**(95.207.181.985,92)**	**(46,13)**
8.1.08	**Beban Penyusutan dan Amortisasi**	**0,00**	**44.650.728.350,55**	**(44.650.728.350,55)**	**(100,00)**
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	42.826.746.479,55	(42.826.746.479,55)	(100,00)
8.1.08.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar	0,00	42.826.746.479,55	(42.826.746.479,55)	(100,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	924.609.915,00	(924.609.915,00)	(100,00)
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	0,00	924.609.915,00	(924.609.915,00)	(100,00)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	406.401.383,00	(406.401.383,00)	(100,00)
8.1.08.03.01	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0,00	406.401.383,00	(406.401.383,00)	(100,00)
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	492.970.573,00	(492.970.573,00)	(100,00)
8.1.08.06.01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	492.970.573,00	(492.970.573,00)	(100,00)
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	**0,00**	**44.650.728.350,55**	**(44.650.728.350,55)**	**(100,00)**
	JUMLAH BEBAN	**111.192.599.130,56**	**251.050.509.467,03**	**(139.857.910.336,47)**	**(55,71)**
	SURPLUS/DEFISIT-LO	**(24.912.915.222,69)**	**(72.569.967.710,78)**	**47.657.052.488,09**	**(65,67)**

3. LAPORAN ARUS KAS.

Laporan Arus Kas RSUD Kota Mataram Per 30 Juni Tahun 2023 dapat dijelaskan melalui data pada Tabel 2.12 berikut.

Tabel 2.12. Laporan Arus Kas RSUD Kota Mataram
Per 30 Juni 2023

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1	**AKTIVITAS OPERASIONAL**		
	PENERIMAAN OPERASIONAL		
	PENDAPATAN JASA LAYANAN		
	Pasien JKN/BPJS	96,965,884,618.00	187,995,962,319.00
	Pasien Umum	7,896,186,075.93	15,349,529,828.21
	Pasien Kerjasama	1,954,867,548.00	4,852,512,820.00
	PENDAPATAN HIBAH	-	-
	Hibah Tunai	-	-
	Hibah Barang	-	-
	PENDAPATAN KERJASAMA	-	-
	Pendapatan Sewa	174,179,024.00	251,093,175.00
	PENDAPATAN APBD	-	-
	UP/GU/TU	9,068,034,816.00	20,281,418,519.00
	LS	11,802,935,639.00	23,871,429,443.00
	Hibah Barang	-	-
	PENDAPATAN APBN	-	-
	PENDAPATAN LAIN-LAIN	-	-
	Jasa Giro Bank	552,263,817.94	825,663,841.04
	Jumlah Penerimaan Operasional	128,414,351,538.87	253,427,609,945.25
	PENGELUARAN OPERASIONAL		
	BELANJA OPERASIONAL		
	Belanja Pegawai	18,480,937,879.00	33,071,010,701.00
	Belanja Persediaan	29,089,675,487.00	89,779,759,928.00
	Belanja Jasa Pelayanan	36,569,512,793.00	64,824,471,011.00
	Belanja Pemeliharaan	4,102,315,054.00	6,030,289,628.00
	Belanja Langganan Daya dan Jasa	20,694,425,304.56	43,541,864,926.05
	Belanja Perjalanan Dinas	-	422,414,229.00
	Jumlah Pengeluaran Operasional	108,936,866,517.56	237,669,810,423.05
	Arus Kas Bersih Operasional	19,477,485,021.31	15,757,799,522.20
2	**AKTIVITAS INVESTASI**		
	PENERIMAAN INVESTASI	0	0
	PENGELUARAN INVESTASI (BELANJA MODAL)		
	Tanah	-	-
	Gedung dan Bangunan	550,959,320.00	6,740,738,682.00
	Peralatan dan Mesin	1,238,594,257.00	4,363,355,841.00
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	237,626,000.00
	Aset Tetap Lainnya	-	-
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Aset Tak Berwujud	-	-
	Aset Lain-lain	-	-
		1,789,553,577.00	11,341,720,523.00
	Arus Kas Bersih Investasi	(1,789,553,577.00)	(11,341,720,523.00)

3	**AKTIVITAS PENDANAAN**			
	PENERIMAAN PENDANAAN			
		Penarikan Utang Bank	-	5,000,000,000.00
	Jumlah Penerimaan Pendanaan		-	5,000,000,000.00
	PENGELUARAN PENDANAAN			
		Pembayaran Utang Bank	-	5,000,000,000.00
		Setoran ke Kas Daerah	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pendanaan		-	5,000,000,000.00
	Arus Kas Bersih Pendanaan		-	-
		Jumlah Arus Kas Bersih	17,687,931,444.31	4,416,078,999.20
4	**SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE**		9,267,732,650.05	4,851,653,650.73
5	**SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE**		26,955,664,094.36	9,267,732,649.93

BAB III
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN YANG DIANGGARKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN BLUD YANG MEMPENGARUHI.

1. Analisis Internal.

a. Kondisi Pelayanan Medis.

1). Kekuatan.

Dalam operasionalnya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, baik itu pasien umum, Jamkesmas, maupun Jamkesda. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu meliputi:

a). Pelayanan IGD 24 jam Terintegrasi dan Mataram Emergency Medical Service (MEMS)
b). Pelayanan Rawat Inap Kls I, II, dan III
c). Pelayanan Rawat Inap Kls VIP A,VIP B dan VIP Nifas
d). Pelayanan Rawat Jalan pagi-sore dan Eksekutif
e). Pelayanan Kamar Operasi
f). Pelayanan Radiologi
g). Pelayanan Laboratorium
h). Farmasi / Apotek 24 jam
i). Pelayanan ICU/ICCU/Pelayanan Jantung Terpadu
j). Pelayanan NICU/PICU
k). Pelayanan Ruang Bersalin dan Nifas
l). Pelayanan Hemodialisa
m). Pelayanan MRI Dan CT Scan
n). Pelayanan Gizi
o). Pelayanan Ambulans/Jenazah
p). HCU (High Care Unit)/Stoke Center
q). Pelayanan Farmasi/Antar Obat Gratis
r). Pelayanan Bank Darah
s). Pelayanan CSSD
t). Pelayanan Terapi Hiperbaric Chamber

u). Pelayanan Cathlab/Pelayanan Jantung Terpadu

v). Pelayanan Insiminasi Bayi Tabung (*Intrauterine Insemination*).

w). Rumah Duka/Kamar Jenazah

x). Pelayanan Diklat/Pendidikan.

y). Pelayanan home Care

z). Pelayanan Artis Cantik (Antar Obat Gratis cepat akurat dan Simpatik)

aa). Pelayanan Permaisuri Dancing (Persalinan Aman Bayi Sehat Ibu Berseri dengan ANC rutin USG)

ab). Pendekar Serasi (Penanganan Dini, emergency, Kuratif, rehabilitasi Stroke terintegrasi)

ac). Maharestu (Mataram Harum Rendah Stunting).

2). Kelemahan.

a). *Health Education* masih perlu memenuhi standar akreditasi baru.

b). Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan.

c). Belum diterapkannya reward dan punishment.

d). Komitmen SDM belum maksimal.

b. Kondisi Keuangan

1). Kekuatan.

a). *Gross Ratio (GR)*

Pertumbuhan pendapatan untuk RBA pada tahun ini dinaikkan 12 % diharapkan dapat tercapai, seperti yang dijelaskan melalui data pada Tabel 3.1. berikut.

Tabel 3.1. Pertumbuhan Pendapatan
Tahun 2022– Per Juni 2023

NO	TAHUN	PENDAPATAN (Rp.)	GR (%)
1	2022	209.274.761.983,25	45%
2	2023	107.543.381.083,86	19,4%

**).Sumber Data : Lap. Semester I Bagian Keuangan*

b). Cost *Recovery Ratio (CRR).*

Cost *Recovery Ratio (CRR)* keuangan apabila gaji diperhitungkan sebesar 115%, sehingga rumah sakit masih memerlukan subsidi, dan jika gaji tidak diperhitungkan maka sebesar 181%, seperti pada Tabel 3.2. berikut.

Tabel 3.2.CRR dengan Gaji dan Tanpa Gaji
Tahun 2023

NO.	TAHUN	PENDAPATAN	BIAYA OPERASIONAL (DENGAN GAJI)	CRR (%)	SUBSIDI (%)
1	2023	128.414.351.538,87	111,192,599,130.00	115,48%	115%
NO.	**TAHUN**	**PENDAPATAN**	**BIAYA OPERASIONAL (TANPA GAJI)**	**CRR (%)**	**SUBSIDI (%)**
1	2023	128.414.351.538,87	70,837,985,493.00	181,27%	181%

**). Sumber Data : Lap. Semester I Bagian Keuangan (Lap. LAK)*

c). Likuiditas

- *Cash Ratio.*

  Kemampuan kas untuk membayar kewajiban jangka pendek belum bisa mencukupi karena pada per 30 Juni tahun 2023 sebesar 56,2% artinya RSUD harus menunggu piutang BPJS untuk membayar kewajiban jangka pendek.

Tabel 3.3. Kemampuan Kas Guna Membayar Kewajiban
Jangka Pendek Tahun 2022/2023

NO	TAHUN	KAS	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	*CASH RATIO (%)*
1.	2022	29.462.741.534,36	35.342.945.816,06	*83,4%*
2.	2023	26.955.664.094,09	47.996.957.817,81	56,2%

**)Sumber Data: Lap. Semester I Bagian Keuangan (Lap.Neraca)*

- *Current Ratio.*

  Kemampuan RS menggunakan seluruh aset lancar guna membayar seluruh kewajiban jangka pendek belum maksimal pada *Semester I* tahun 2023 sebesar 124,3% sehingga rumah sakit masih membutuhkan subsidi guna membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar bila sewaktu-waktu dilikuidir, seperti pada Tabel 3.4. berikut.

Tabel 3.4. Kemampuan aset lancar guna membayar kewajiban jangkapendek Tahun 2022/2023

NO	TAHUN	ASET LANCAR	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	*CURRENT RATIO (%)*
1.	2022	86.465.500.563,17	35.342.945.816,06	244,6%
2.	2023	59.672.449.212,53	47.996.957.817,81	124,3%

**). Sumber Data: Semester I Bagian Keuangan (Lap.Neraca)*

- *Solvabilitas Ratio.*

  Kemampuan Rumah Sakit dalam membayar semua kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang pada semester I tahun 2023 sebesar 10,56% sehingga rumah sakit mampu membayar semua kewajibannya bila sewaktu-waktu dilikuidir,seperti pada Tabel 3.5. berikut.

Tabel 3.5. Kemampuan Total aset untuk membayar total kewajiban tahun 2022/2023

NO	TAHUN	TOTAL ASET	TOTAL KEWAJIBAN	*SOLVABILITAS RATIO (%)*
1.	2022	433.908.865.910,24	80.959.948.846,50	18,66
2.	2023	454.639.299.098,27	47.996.957.817,81	10,56%

**). Sumber Data: Semester I Bagian Keuangan (Lap.Neraca)*

2). Kelemahan.

a). Masih membutuhkan subsidi belanja pegawai (Gaji PNS)

b). Masih membutuhkan subsidi/ bantuan dari Pemerintah Pusat ataupun Daerah untuk membiayai total biaya termasuk biaya operasional dan investasi.

a). *Operating Ratio.*

Operating ratio mencerminkan tingkat efisiensi BLUD, Jika rasio yang tinggi maka menunjukkan keadaan yang kurang baik karena setiap rupiah pendapatan yang terserap dalam biaya, juga tinggi, dan yang tersedia untuk surplus kecil. Tetapi rasio yang tinggi mungkin tidak hanya disebabkan oleh faktor intern yang dapat dikendalikan oleh manajemen, tetapi juga faktor ekstern misalnya faktor harga yang sulit dikendalikan oleh manajemen, kebijakan rujukan BPJS berjenjang dan kebijakan bebas biaya untuk warga kota mataram yang dirawat di kelas III, seperti pada Tabel 3.6. berikut.

Tabel 3.6. Tingkat Efisiensi BLUD
Semester I tahun 2023

NO.	TAHUN	BIAYA PELAYANAN	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	*TOTAL PENDAPATAN*	*OR (%)*
1.	2022	74.443.171.927	16.576.534.788	95.047.888.878,95	96%
2.	2023	144.718.335.582,93	19.600.000.000	86.277.482.934,87	190%

**)Sumber Data: Semester I Bagian Keuangan (Lap.LO, Beban Operasional)*

$$\frac{\text{Biaya Pelayanan + Biaya Umum dan Administrasi}}{\text{Total Pendapatan}} = \ldots \%$$

b). *Return on Investment (ROI)*

Rasio Tingkat Pengembalian Investasi (Return on Investment, ROI) Tujuan perhitungan rasio ini adalah untuk mengetahui

sampai seberapa jauh efektifitas investasi yang digunakan dapat menghasilkan pendapatan. Dengan kata lain, investasi yang dihitung disini hanya investasi yang memberikan konstribusi terhadap pencapaian pendapatan. Demikian halnya dengan biaya investasi. Biaya Investasi ada yang berupa investasi belum selesai atau investasi tidak operasional. Oleh karena itu juga tidak diikutsertakan dalam pengertian biaya investasi, seperti pada Tabel 3.7. berikut.

Tabel 3.7. Tingkat Efektifitas Aset terhadap Pendapatan BLUD Semester I tahun 2023

NO.	TAHUN	TOTAL PENDAPATAN	AKTIVA OPERASI	ROI (%)
1.	2022	95.047.888.878,95	100.013.994.455,11	95,03%
2.	2023	107.543.381.083,87	110.726.420.094,56	97,12%

*)Sumber Data: Semester I Bagian Keuangan (Lap.LO dan LRA)

c). Return on Equity (ROE).

ROE yaitu Rasio ini berguna untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang diperoleh dari penanaman modal.Pengertian modal disini adalah semua modal yang tertanam, termasuk di dalamnya Surplus/silpa. Rumus perhitungannya :

ROE = Laba bersih sesudah pajak: Ekuitas x 100

Seperti pada Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8. Tingkat Pengembalian Equitas BLUD Semester I tahun 2023

NO.	TAHUN	SURPLUS/SILPA	EQUITAS	ROE (%)
1	2022	9.267.732.649,93	412.830.911.436,29	2,24%
2	2023	-	406.644.341.228,46	-

*)Sumber Data: Semester I Bagian Keuangan (Lap.LO dan Neraca)

c. Kondisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Mataram mulai operasional dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sejak Maret 2010, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1225/MENKES/SK/VIII/2010 Tanggal 27 Agustus 2010 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram menjadi Rumah Sakit Kelas B.

Struktur Organisasi:

- Direktur : dr. Hj. NK Eka Nurhayati., Sp.O.G., Subsp., F.E.R., M.Kes., M.Sc
- Wadir Bid.Umum dan keuangan : drg. Dianita Rahmi
- Wadir Bid. Pelayanan : dr.H. Tris Cahyoso., MARS
- Kepala Bagian Program, Humas dan Rekam Medik : Lalu Ery Setiawan., SE
- Kepala Bagian Keuangan : Khaerul Hamdi, SE.,M.Ak
- Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan : Lalu Budiawan., SKM.,MM
- Kepala Bidang Pelayanan Medik : dr.Suwondo Ariyanto, Sp.JP.,FIHA
- Kepala Bagian Umum : Srianingsih., SST., M.Kes
- Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik : Fatwadi., S.Si., M.Ak
- Perencana : Putu Widhi Sudariani., S.Kep., Ns., M.Kep

- Analis Keuangan Pusat dan Daerah : Baiq Suriayani., SIP
- Administrator Kesehatan : Afrina Susiarty., SST.,MM
- Analis Kepegawaian : Baiq Sukmawati., SE., MM
- Administrator Kesehatan : Dewi Ekawati, S.IP
- Administrator Kesehatan : Lalu Dedi Hidayat., S.Kep
- Administrator Kesehatan : Fafir Rahmah., S.Si., Apt
- Administrator Kesehatan : drg. Rina Yulia Wulandari
- Analis Keuangan Pusat dan Daerah : Susiana Hastuti., SKM., MM
- Perencana : Astuti Sastrawati., SST
- Pranata Kehumasan : Yuda Prasetya., S.Kep., Ns
- Administrator Kesehatan : Zakaria Ahmad Ezis., SKM
- Administrator Kesehatan : dr. Ni Wayan Suanita Kusumawardani
- Dewan Pengawas
- Komite Etik Dan Hukum
- Komite Medik
- Komite Keperawatan
- Komite Farmasi dan Terapi
- Satuan Pengawas Intern (SPI)
- Kelompok Jabatan Fungsioal.

Adapun kondisi tenaga kesehatan yang ada di RSUD Kota Mataram, seperti pada Tabel 3.9. berikut.

Tabel 3.9. Jumlah Tenaga Kesehatan / Non Kesehatan
Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram

Rekapitulasi Pegawai PNS dan Non PNS
RSUD Kota Mataram Per Oktober 2023

No.	Jabatan	2023				Jumlah	Ket
		PNS	P3K	Non PNS	Mitra		
1	Direksi	22				22	
2	Dokter Spesialis	**36**	**4**	**12**	**8**	**60**	
	Obgyn	2		1		3	
	Penyakit Dalam	5		1		6	
	Bedah	4		1		5	
	Anak	3		2		5	
	Radiologi	2	1			3	
	Rehabilats Medik	1		1		2	
	Anestesi	2	1			3	
	Mata	2				2	
	Jantung	2		1	2	5	
	Patoligi Klinik	1		1		2	
	Patologi Anatomi	1		1		2	
	Urologi				1	1	
	Bedah Anak		1			1	
	Bedah Saraf				1	1	
	Orthopedi	2		1		3	
	Emergency Medicine				1	1	
	Gizi Klinik	1				1	
	Paru	1		1		2	
	Jiwa	1				1	
	Kulit dan Kelamin	1				1	
	THT	3				3	
	Andrologi				1	1	
	Saraf	2	1			3	
	Kesehatan Penerbangan				1	1	
	Forensik				1	1	
	Akupuntur			1		1	
3	Dokter Gigi Spesialis	**2**		**2**		**4**	
	Spesialis Penyakit Mulut	1				1	

	Spesialis Bedah Mulut			1		1	
	Spesialis Peridonsia	1				1	
	Spesialis Konservasi Gigi			1		1	
	Total Dokter Spesialis						
4	Dokter Umum	**20**	**3**	**47**		**70**	
5	Dokter Gigi Umum	**6**		**1**		**7**	
6	Perawat	**88**	**3**	**280**		**371**	
7	Terapis Gigi dan Mulut	**10**		**2**		**12**	
8	Ortotis Protetis	**2**				**2**	
9	Refraksionis Optisien	**3**				**3**	
10	Penata Anestesi	**3**				**3**	
11	Asisten Penata Anestesi	**8**		**3**		**11**	
12	Bidan	**25**	**1**	**60**		**86**	
13	Perekam Medis	**7**	**1**	**17**		**25**	
14	Fisioterapis	**6**	**2**	**9**		**17**	
15	Okupasi terapi	**3**		**1**		**4**	
16	Terapis Wicara	**3**		**1**		**4**	
17	Laboratorium						
	- Analis Kesehatan	**14**		**31**		**45**	
	- Teknisi Pelayanan Darah	**1**		**3**		**4**	
18	Nutrisionis	**13**	**1**	**7**		**21**	
19	Radiografer	**6**		**7**		**13**	
20	Apoteker	**8**	**1**	**15**		**24**	
21	Asisten Apoteker	**14**	**1**	**34**		**49**	
22	Teknisi Elektro Medis	**5**				**5**	
23	Sanitarian	**5**		**1**		**6**	
24	Pramusaji			**25**		**25**	
25	Administrator Kesehatan					**0**	
26	Administrator SIMRS			**1**		**1**	
27	Design Grafis			**1**		**1**	
28	Front Office			**7**		**7**	
29	Pengadministrasi Farmasi			**1**		**1**	
30	Pengadministrasi			**8**		**8**	

	Pendaftaran						
31	Pengadministrasi SIMRS			**6**		**6**	
32	Pengadministrasi Umum	**33**		**146**		**179**	
33	Pengadministrasi Umum dan Pembantu Kasir Penerima			**14**		**14**	
34	Pengadministrasi Umum Kepegawaian			**5**		**5**	
35	Pengadministrasi Umum Keuangan			**3**		**3**	
36	Petugas Sterilisasi (CSSD)			**17**		**17**	
37	Programer			**2**		**2**	
38	Satpam			**21**		**21**	
39	Sopir			**18**		**18**	
40	Transpoter			**27**		**27**	
41	Tenaga Teknisi Umum			**11**		**11**	
Jumlah		**343**	**17**	**846**	**8**	**1214**	

Indentifikasi kondisi eksisting dianalisa menggunakan **analisis SWOT**

1. Kekuatan dan kelemahan

1.1. Kekuatan

M1: *Man* (Sumber Daya Manusia)

a. Adanya sistem pengembangan staf berupa pelatihan dan pendidikan berkelanjutan
b. Terdapat tenaga dokter spesialis dan subspesialis yang cukup lengkap
c. Memiliki Sumber Daya Manusia yang muda dan mempunyai semangat untuk berkembang

M2: *Material* (Sarana Prasarana)

a. Alat-alat penunjang medis cukup lengkap
b. Bagunan dan sarana prasarana yang cukup lengkap

M3:*Method* (Metode)

a. RS Memiliki Visi, Misi sebagai acuan melaksanakan kegiatan pelayanan
b. Sudah dilakukan assesment kompetensi bagi tenaga medis
c. Mempunyai protap untuk setiap tindakan
d. Sudah ditetapkan menjadi Rumah Sakit Wisata Medis/Hospital tourism

M4:*Money* (Keuangan)

a. Ada pendapatan dari jasa pelayanan rumah sakit berupa remunerasi
b. Pembiayaan dari BLUD, APBD dan sumber pembiayaan lainnya

M5: Mutu

a. Kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit
b. Digitalisasi pelayanan
c. Adanya variasi karakteristik pasien (BPJS, UMUM, Asuransi lainnya)
d. Sebagai lahan praktik mahasiswa Kesehatan

1.2. Kelemahan.

M1: *Man* (Sumber Daya Manusia)

a. Etos kerja dan *sense of crisis* yang kurang dari SDM yang ada.
b. Kesejahteraan karyawan tidak merata.

M2:*Material* (Sarana Prasarana)

a. Penataan letak ruangan yang tidak terintegrasi satu sama lain.
b. Lahan yang kurang untuk pengembangan Rumah Sakit, termasuk lahan parkir untuk pengunjung Rumah Sakit.

M3:*Method* (Metode)

a. Pelaksanaan digitalisasi pelayanan yang belum optimal
b. Pelayanan RSUD Kota Mataram belum mewujudkan PCC (*Patient Center Care*), sehingga belum optimal dan berdaya saing
c. Pelayanan keperawatan RSUD Kota Mataram belum sesuai standar yang diharapkan
d. *Multi Disiplinround* (MDR) belum terlaksana sehingga LOS meningkat

M4:*Money* (Keuangan)

a. Administrasi keuangan belum akuntabel

M5: Mutu

a. LOS yang memanjang
b. Penumpukan pasien di IGD.

2. Tantangan dan peluang

2.1. Tantangan (M1-M5)

a. Adanya tuntutan tinggi dari masyarakat untuk pelayanan yang lebih profesional
b. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan hukum
c. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan
d. Persaingan antar RS yang semakin ketat
e. Terbatasnya peningkatan kualitas SDM
f. Bebasnya Pers yang dapat langsung menyebarkan informasi dengan cepat

2.2.Peluang (M1-M5)

a. Adanya program pelatihan karyawan dari diklat
b. Adanya kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi
c. RSUD Kota Mataram merupakan RS Pendidikan
d. Adanya program akreditasi RS dari pemerintah melalui KARS
e. Pendanaan untuk pengembangan sumber daya dari pemerintah

d. Sarana dan Prasarana

1.	Status Kepemilikan	:	Pemerintah Kota Mataram
2.	Kelas Rumah Sakit	:	B
3.	Luas Tanah	:	24.083 m^2
4.	Luas Bangunan	:	20.815 m^2
5.	Fasilitas listrik	:	PLN sebanyak 1700 KVA/Megawatt
6.	Fasilitas listrik Diesel	:	1850 KVA
7.	Fasilitas air	:	PDAM dan Pompa Bor Air Tanah
8.	Fasilitas gas	:	Sentral Oksigen (O_2) Kapasitas 13 Ton
9.	Fasilitas pengolahan-Limbah	:	IPAL Kapasitas 200 m^3; Incenerator 1 bh
10.	Komunikasi	:	PABX
11.	Tata Udara	:	AC Central
12.	Peralatan	:	Medik dan Non Medik
13.	Transportasi	:	Ambulans 4 unit; Mobil Jenazah 5 unit; Mobil Dinas Operasional 7 unit; dan Sepeda Motor 10 unit

1). Kekuatan:

a). Sarana pelayanan sangat memadai
b). Cukup tersedia alat canggih
c). Lokasi rumah sakit yang strategis
d). Fasilitas gedung yang luas dan nyaman

2). Kelemahan:

a). Penyempurnaan Sistem SIMRS secara optimal dan modul SIM masih perlu di inovasi untuk menyesuaikan kebutuhan pelayanan yang maksimal.

b). Lahan Parkir yang semakin kurang karena bertambahnya kendaraan bermotor dan bertambahnya gedung.

c). Jadwal pemeliharaan dan kecepatan perbaikan sarana prasarana yang belum tepat waktu.

2. **Analisis Eksternal.**

a. UU dan PP yang terkait dengan BLU

1). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;

2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3). Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaan Daerah;

5). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah;

6). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

8). Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

9). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11). Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram;

12). Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah Kota Mataram;

13). Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;

14). Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum daerah Kelas B Kota Mataram.

15). Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Umum Layanan Daerah (BLUD).

b. Kebijakan subsidi Pemerintah untuk Rumah Sakit

Dukungan dari pemerintah Kota Mataram Tahun 2023 dalam jumlah anggaran RKA sebelum perubahan untuk bidang kesehatan khusus Rumah Sakit Umum Kota Mataram diperkirakan sebesar Rp.263.538.418.425,-. Dengan alokasi Belanja untuk belanja Operasi sebesar Rp. 222,816.204.557,-. Belanja Pegawai ASN sebesar Rp. 25.927.211.059,- dan Belanja Non Operasional sebesar Rp. 40.722.213.868,-.Subsidi dari Pemerintah Kota masih digunakan untuk membiayai operasional Rumah Sakit dan untuk membiayai sarana dan prasarana Rumah Sakit, sedangkan dari target pendapatan jasa layanan tahun 2023 sebesar Rp. 180.000.000.000,.

c. Kebijakan Pemerintah tentang SDM/PNS

Pegawai Negri Sipil (PNS) Kota Mataram sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan Kota Mataram, Tahun 2020 didukung oleh 5.170 orang pegawai negeri sipil. Dari total PNS yang ada di Kota Mataram, 2,15% menduduki golongan I, 23,67% menduduki golongan II, 43,18% golongan III dan 31% golongan IV. Di bandingkan dengan tahun 2008, ada kenaikan jumlah PNS di Kota Mataram, disebabkan karena adanya penambahan pegawai dari

honor dan tenaga teknis untuk peningkatan pelayanan teknis terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

d. Perkembangan Sosial Budaya dan tingkat pendidikan masyarakat

Kota Mataram terbentuk pada tanggal 31 Agustus 1999, dengan luas wilayah 60,30 km2 dan yang terbagi atas 6 Kecamatan. Selain merupakan Ibukota Propinsi NTB, Kota Mataram juga sebagai Pusat Pemerintahan, Pusat Pendidikan dan Pusat Perekonomian barang dan jasa. Penyebaran penduduk di Kota Mataram menunjukkan penduduk usia muda 0-24 tahun sebesar 49,99%, kelompok usia 25-59 tahun sebesar 43,41% dan 60 tahun keatas sebesar 6,9%. Kondisi lainnya menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari jumlah penduduk perempuan. Dalam bidang pendidikan, tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tertinggi terdapat di tingkat SD/MI yaitu107,45 % dan yang terendah di tingkat SMA/MA/SMK yaitu 75,46 % . Angka Partisipasi Murni (APM) tertinggi terdapat di tingkat SD/MI yaitu 95,86 % dan terendah di tingkat SMA/MA/SMK yaitu 71,32 %.

e. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menunjukkan jati dirinya dalam peradaban manusia dewasa ini. Peran perkembangan teknologi informasi telah memberikan share yang signifikan terhadap nilai tambah eknomi. Efisiensi dalam berbagai bidang, khususnya dalam masalah waktu, tenaga dan biaya melalui kecepatan dan ketepatan informasi. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menjangkau seluruh penjuru tanah air, bahkan mancanegara, maka penggunaan jasa dan fasilitas informasi dan telekominikasi ditingkatkan sebagai peluang usaha bagi masyarakat dan pemerintah. Sehingga pada saatnya dapat

memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Khususnya dalam bidang pemerintahan, E- government mengacu pada penggunaan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Pada intinya e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain.

f. Keadaan persaingan dalam industri pelayanan kesehatan

Dalam strategi bersaing Rumah Sakit Umum Kota Mataram berusaha untuk menjadi Rumah Sakit yang ramah, profesional, unggulan dan menjadi pilihan utama bagi masyarakat kota Mataram dan sekitarnya. Strategi bersaing penentuan posisi suatu usaha bertujuan untuk memaksimalkan nilai kemampuan yang memberdayakan dengan pesaing.

Dilihat dari posisi lokasi Rumah Sakit Umum Kota Mataram menempati lokasi yang sangat strategis, mudah dijangkau dari berbagai arah dan hal ini merupakan modal dasar yang sangat besar.

Tingkat fasilitas diantara pesaing, Rumah Sakit Umum Kota Mataram berupaya dengan meningkatkan mutu pelayanan untuk menuju pelayanan prima. Beberapa rumah sakit yang menjadi pesaing adalah Rumah Sakit Umum Propinsi, Rumah Sakit Islam, Rumah Sakit Risa Medika, Rumah Sakit Umum Bhayangkara, Rumah Sakit Biomedika, Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit TNI AD dan Rumah Sakit Karang Ujung dan Rumah Sakit Harapan Keluarga, selain RSUP semuanya merupakan rumah sakit swasta dan rumah sakit milik Polri dan TNI.

g. Globalisasi Ekonomi;

Pada Tahun 2019, secara makro laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram mencapai 8,74 % mengalami peningkatan jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2018) yang hanya mencapai pertumbuhan sebesar 7,76 %, hal ini disebabkan adanya beberapa sektor ekonomi yang mengalami peningkatan terutama untuk sektor bangunan dan Perdagangan. Sedangkan untuk laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2011 sebesar 8,18 %. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Mataram terhadap pembentukan PDRB Propinsi Nusa Tenggara Barat, pada tahun 2011 mencapai 13,97 %.

Kontribusi PDRB Kota Mataram terhadap PDRB Propinsi Nusa Tenggara Barat masih di dominasi oleh sektor pengangkutan dan komunikasi yang memberikan kontribusi sebesar 38,33 %, kemudian diikuti oleh sektor keuangan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 32, 91 %. Sedangkan sektor yang memiliki kontribusi terkecil adalah sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 0,11 %.

B. ASUMSI YANG DIGUNAKAN.

Perbandingan antara asumsi makro dan mikro dengan realisasi secara kuantitatif tertuang dalam tabel berikut:

1. ASPEK MAKRO

Asumsi makro yang digunakan sebagai pembanding, seperti pada Tabel 3.10. berikut.

Tabel 3.10. Asumsi makro yang digunakan sebagai pembanding dengan realisasi kuantitatif.

NO.	UNSUR	ASUMSI 2023	PROGNOSA 2022	Ket.
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	6,5 %	6 %	-
2.	Tingkat Inflasi (%)	4-5 %	10 %	-
3.	Pertumbuhan Pasar (%)	30%	30%	-
4.	Tingkat Suku Bunga Pinjaman (%)	11%	11%	-
5.	Kurs 1 US$ (Rp)	14.958	15.260	-

2. ASPEK MIKRO

Asumsi mikro yang digunakan sebagai pembanding, seperti pada Tabel 3.11. berikut.

Tabel 3.11. Asumsi mikro yang digunakan sebagai pembanding dengan realisasi kuantitatif.

NO.	UNSUR	ASUMSI 2023	PROGNOSA 2022	Ket
1.	Pembiayaan public sebagai fungsi *PSO (APBD & APBN)*	-	-	-
2.	Perubahan tarif layanan	Ada	Ada	-
3.	Pengembangan produk baru	Ada	Ada	-
4.	Peningkatan volume layanan	Ada	Ada	-
5.	Asumsi-asumsi dalam analisis rasio keuangan Perputaran piutang Perputaran persediaan	-	-	-

(Dijelaskan implikasi masing-masing asumsi terhadap rencana kinerja, berupa persentase, pertumbuhan, kenaikan/penurunan)

C. SASARAN, TARGET, KINERJA DAN KEGIATAN

1. Pelayanan (Berdasarkan Kelompok).

Sasaran, target, kinerja dan kegiatan dari aspek pelayanan (berdasarkan Kelompok), seperti pada Tabel 3.12. berikut.

Tabel 3.12. Sasaran, target, kinerja dan kegiatan dari aspek pelayanan (berdasarkan Kelompok).

NO.	KEL. PELAYANAN	SATUAN	KINERJA PELAYANAN TH. 2023			KET
			Target	Realisasi	Prognosa	
1	Kunjungan Rwt Jalan	Org	198.976	184.305	14.671	-
2	Kunjungan IGD	Org	101.014	101.291	(277)	sesuai target
3	Pasien Rawat Inap	Org	19.355	14.754	4.601	-
4	B O R	%	75	55.82%	19.18%	-
5	L O S	Hari	6	4	2	-
6	T O I	Hari	3	2.44	0.56	-

2.Pelayanan (Berdasarkan Unit).

Sasaran, target, kinerja dan kegiatan dari aspek pelayanan (berdasarkan unit), seperti pada Tabel 3.13. berikut.

Tabel 3.13. Sasaran, target, kinerja dan kegiatan dari aspek pelayanan (berdasarkan unit).

No.	UNIT PELAYANAN	SATUAN	KINERJA PELAYANAN TH. 2023		KET
			Target	Realisasi	
1.	Instalasi Gawat Darurat	Org	101.014	101.291	-
2.	Instalasi Rawat Jalan	Org	198.976	184.305	-
3.	Instalasi Rawat Inap	Org	19.355	14.754	-
	Jumlah		**319.345**	**300.350**	

D. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN

1. Program Kerja

Peningkatan Pelayanan BLUD

2. Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan/Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

a. Pelayanan**,** terdiri dari :

1). Meningkatkan Mutu Layanan IGD dan Rawat Jalan

2). Meningkatkan Mutu Layanan Rawat Inap

3). Meningkatkan Mutu Layanan Rawat Intensif

4). Meningkatkan Mutu Layanan Bedah Sentral

5). Meningkatkan Mutu Layanan Laboratorium

6). Meningkatkan Mutu Layanan Radiologi

7). Meningkatkan Mutu Layanan Gizi

8). Meningkatkan Mutu Layanan Farmasi

9). Meningkatkan Mutu Layanan CSSD

10). Meningkatkan Mutu Layanan Sanitasi

11). Meningkatkan Mutu Layanan IPSRS

12). Meningkatkan Mutu Layanan Hemodialisa

b. Pendukung Pelayanan, terdiri dari :

1). Unit Kerja Keuangan

2). Unit Kerja Perencanaan dan Pelaporan

3). Unit Kerja Umum, Humas dan Kepegawaian

4). Unit Kerja Pelayanan Medis

5). Unit Kerja Keperawatan

6). Unit Kerja Penunjang Medis

7). Unit Kerja Penunjang non Medis

E. PERKIRAAN PENDAPATAN

1. Pendapatan Pelayanan Umum.

Perkiraan pendapatan pelayanan umum pada RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023, seperti pada Tabel 3.14 berikut.

Tabel 3.14. Perkiraan pendapatan pelayanan umum pada RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023.

No.	Unit Pelayanan	Satuan	2023		Bertambah/ (Berkurang)
			Sebelum	Setelah	
I	Pendapatan Pasien Umum	1 tahun	27,706,000,000	10,500,000,000	(17,206,000,000)

2. Pendapatan JKN/BPJS.

Perkiraan pendapatan JKN/BPJS pada RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023, seperti pada Tabel 3.15 berikut.

Tabel 3.15. Perkiraan pendapatan JKN/BPJS pada RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023.

No.	Unit Pelayanan	Satuan	2023		Bertambah/ (Berkurang)
			Sebelum	Setelah	
I	Pendapatan JKN/BPJS	1 tahun	123,780,000,000	162,957,000,000	39,177,000,000

3. Pendapatan Kerjasama Operasional.

Perkiraan pendapatan kerjasama operasional pada RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023, seperti pada Tabel 3.16 berikut.

Tabel 3.16. Perkiraan pendapatan kerjasama operasional
Pada RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023.

No.	Unit Pelayanan	Satuan	2023		Bertambah/ (Berkurang)
			Sebelum	Setelah	
1	Pendapatan Jaminan Pasien Miskin	1 tahun	3,430,000,000	3,600,000,000	170,000,000
2	Jasa Raharja	1 tahun	2,500,000,000	1,000,000,000	(1,500,000,000)
3	BPJS Ketenagakerjaan	1 tahun	250,000,000	326,000,000	76,000,000
4	Asuransi Lainnya	1 tahun	-	100,000,000	100,000,000

4. Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah.

Perkiraan lain-lain pendapatan BLUD yang sah pada RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023, seperti pada Tabel 3.17 berikut.

Tabel 3.17. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah
pada RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023

No.	Unit Pelayanan	Satuan	2023		Bertambah/ (Berkurang)
			Sebelum	Setelah	
I	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	1 tahun	647,000,000	643,000,000	(4,000,000)
	a. Penerimaan Jasa Giro	1 tahun	70,000,000	120,000,000	50,000,000
	b. Pendidikan dan Diklat	1 tahun	400,000,000	446,000,000	46,000,000
	c. Sewa	1 tahun	177,000,000	77,000,000	(100,000,000)

5. Pendapatan Lainnya.

Perkiraan pendapatan lainnya pada RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023, seperti pada Tabel 3.18 berikut.

Tabel 3.18. Perkiraan pendapatan lainnya pada
RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023

No.	Unit Pelayanan	Satuan	2023		Bertambah/ (Berkurang)
			Sebelum	Setelah	
I	Parkir	1 tahun	100,000,000	100,000,000	-
II	Hibah	1 tahun	-	-	-
III	Pendapatan Hasil Kerjasama	1 tahun	-	-	-
IV	APBD	1 tahun	34,529,814,157	42,850,884,067	8,321,069,910
V	APBN (DBHCHT & DAK)	1 tahun	69,008,604,268	69,008,604,268	-
VI	SILPA BLUD	1 tahun	-	9.267.732.649,93	9,267,732,649.93

6. Total Pendapatan BLUD.

Total pendapatan BLUD pada RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023, seperti pada Tabel 3.19. berikut.

Tabel 3.19. Perkiraan pendapatan lainnya pada RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)
		Sebelum	Setelah	
I	**PENDAPATAN**			
4	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**160,000,000,000**	**180,000,000,000**	**20,000,000,000**
4.1.	**PENERIMAAN RUMAH SAKIT UMUM**	**160,000,000,000**	**180,000,000,000**	**20,000,000,000**
4.1.1.	**Penerimaan Pelayanan Pasien Umum**	**27,701,000,000**	**10,500,000,000**	**(17,201,000,000)**
1	**Layanan Rawat Jalan**	**2,900,000,000**	**780,000,000**	**(2,120,000,000)**
	a. Poli Eksekutif Pagi	300,000,000	200,000,000	(100,000,000)
	b. Poli Eksekutif Sore	100,000,000	100,000,000	-
	c. Poli Reguler Pagi	1,500,000,000	280,000,000	(1,220,000,000)
	d. Poli Reguler Sore	300,000,000	50,000,000	(250,000,000)
	e. MCU	550,000,000	100,000,000	(450,000,000)
	f. Hiperbarik Chamber	150,000,000	50,000,000	(100,000,000)
2	**Layanan IGD dan PONEK**	**4,350,000,000**	**550,000,000**	**(3,800,000,000)**
3	**Layanan Rawat Rawat Inap**	**4,850,000,000**	**1,620,000,000**	**(3,230,000,000)**
4	**Layanan Intensif**	**1,550,000,000**	**910,000,000**	**(640,000,000)**
	a. ICU	450,000,000	300,000,000	(150,000,000)
	b. PICU	250,000,000	60,000,000	(190,000,000)
	c. NICU	350,000,000	200,000,000	(150,000,000)
	d. ICCU	250,000,000	200,000,000	(50,000,000)
	e. Intermediet	150,000,000	50,000,000	(100,000,000)
	f. Stroke Center	100,000,000	100,000,000	-
5	**Layanan Instalasi Bedah Sentral (ruang Operasi)**	**3,000,000,000**	**500,000,000**	**(2,500,000,000)**
6	**Layanan Hemodialisa (HD)**	**600,000,000**	**300,000,000**	**(300,000,000)**
7	**LayananAndrologi**	**10,000,000**	**10,000,000**	**-**
8	**Persalinan (VK)**	**400,000,000**	**200,000,000**	**(200,000,000)**
9	**Home Care**	**271,000,000**	**150,000,000**	**(121,000,000)**
10	**PSC 119 MEMS**	**300,000,000**	**250,000,000**	**(50,000,000)**
11	**Layanan Rehab Medik**	**50,000,000**	**40,000,000**	**(10,000,000)**
12	**Endoskopi**	**350,000,000**	**200,000,000**	**(150,000,000)**
13	**Layanan Laboratorium**	**2,850,000,000**	**1,000,000,000**	**(1,850,000,000)**
14	**BDRS**	**300,000,000**	**200,000,000**	**(100,000,000)**
15	**Layanan Radiologi**	**2,500,000,000**	**1,200,000,000**	**(1,300,000,000)**
16	**Layanan IPJ**	**190,000,000**	**80,000,000**	**(110,000,000)**
	a. LayananJenazah	90,000,000	10,000,000	(80,000,000)
	b. Sewa Freezer	40,000,000	30,000,000	(10,000,000)
	c. Layanan Rumah Duka	50,000,000	30,000,000	(20,000,000)
	d. Surat Visum, medicolegal, dll	10,000,000	10,000,000	-
17	**Layanan Farmasi**	**3,220,000,000**	**2,500,000,000**	**(720,000,000)**
	a. Farmasi Rawat Inap	1,920,000,000	1,000,000,000	(920,000,000)
	b. Farmasi Rawat Jalan	1,300,000,000	1,500,000,000	200,000,000
18	**InstalasiGizi**	**10,000,000**	**10,000,000**	**-**
4.1.2.	**Penerimaan Pelayanan Jaminan Kesehatan**	**123,785,000,000**	**162,957,000,000**	**39,172,000,000**
	1. Penerimaan BPJS	123,785,000,000	162,957,000,000	39,172,000,000
4.1.3	**Pendapatan pasien Tidak Mampu**	**3,430,000,000**	**3,600,000,000**	**170,000,000**
	1. UHC/Dinas Kesehatan Kota	3,100,000,000	3,000,000,000	(100,000,000)
	2. Lombok Barat	200,000,000	500,000,000	300,000,000
	3. Lombok Timur	60,000,000	70,000,000	10,000,000
	4. Lombok Utara	70,000,000	30,000,000	(40,000,000)
	5. BKSPJK	-	-	-

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)
		Sebelum	Setelah	
4.1.4	**Pendapatan Asuransi dan Klaim**	**4,337,000,000**	**2,200,000,000**	**(2,137,000,000)**
4.1.5	**Lain lain Pendapatan RSU yang sah**	**747,000,000**	**743,000,000**	**(4,000,000)**
	1. Penerimaan Jasa Giro	70,000,000	120,000,000	50,000,000
	2. Pendidikan dan Diklat	400,000,000	446,000,000	46,000,000
	3. Parkir	100,000,000	100,000,000	-
	4. Sewa	*177,000,000*	*77,000,000*	(100,000,000)
	a. Apotek	50,000,000	30,000,000	(20,000,000)
	b. Mini Market	7,000,000	7,000,000	-
	c. ATM	120,000,000	40,000,000	(80,000,000)
II	**Jumlah Pendapatan**	**160,000,000,000**	**180,000,000,000**	**20,000,000,000**

F. PERKIRAAN BIAYA.

Perkiraan Biaya pada RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023, seperti pada Tabel 3.20. berikut.

Tabel 3.20. Perkiraan biaya pada RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023

No.	Unit Pelayanan	Satuan	2023		Bertambah/ (Berkurang)
			Sebelum	Sesudah	
I	BIAYA OPERASIONAL	1 tahun	158,501,316,960	155,050,602,933	(3,450,714,027)
II	BIAYA MODAL	1 tahun	1,498,683,040	24,949,397,067	23,450,714,027
	JUMLAH		**160,000,000,000**	**180,000,000,000**	**20,000,000,000**
III	BIAYA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1 tahun	-	-	-
IV	PARKIR	1 tahun	-	-	-
V	APBD	1 tahun	34,529,814,157	42,850,884,067	8,321,069,910
VI	APBN (DBHCHT & DAK)	1 tahun	69,008,604,268	69,008,604,268	-
VII	SILPA BLUD	1 tahun	-	9,267,732,649.93	9,267,732,650
	JUMLAH		**263,538,418,425**	**301,127,220,984.93**	**37,588,802,559.93**

G. ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

1. Anggaran Pendapatan/Penerimaan BLUD.

Anggaran Pendapatan/Penerimaan BLUD pada RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023, seperti pada Tabel 3.21. berikut.

Tabel 3.21. Anggaran Pendapatan/Penerimaan BLUD pada RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023

No.	Unit Pelayanan	Satuan	2023		Bertambah/ (Berkurang)
			Sebelum	Setelah	
I	1. Pendapatan Pasien Umum	1 tahun	27,706,000,000	10,500,000,000	(17,206,000,000)
	2. Pendapatan JKN/BPJS	1 tahun	123,780,000,000	162,957,000,000	39,177,000,000
	3. Penerimaan Jaminan Pasien Miskin	1 tahun	3,430,000,000	3,600,000,000	170,000,000
	4. Pendapatan Asuransi Lainnya	1 tahun	4,337,000,000	2,200,000,000	(2,137,000,000)
	Jumlah Pendapatan Jasa Layanan		**159,253,000,000**	**179,257,000,000**	**20,004,000,000**

II	**Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah**				
	1) Penerimaan Jasa Giro	1 tahun	70,000,000	120,000,000	50,000,000
	2) Pendidikan dan Diklat	1 tahun	400,000,000	446,000,000	46,000,000
	3) Sewa (Apotek, Mini Market, ATM)	1 tahun	177,000,000	77,000,000	(100,000,000)
	4) Parkir	1 tahun	100,000,000	100,000,000	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah		**747,000,000**	**743,000,000**	**(4,000,000)**
	Jumlah I + II		**160,000,000,000**	**180,000,000,000**	**20,000,000,000**
III	**APBD**	**1 tahun**	**34,529,814,157**	**42,850,884,067**	**8,321,069,910**
IV	**APBN (DBHCHT & DAK)**	**1 tahun**	**69,008,604,268**	**69,008,604,268**	**-**
V	**SILPA BLUD**	**1 tahun**	**-**	**9,267,732,649.93**	**9,267,732,649.93**
	JUMLAH PENDAPATAN (I s/d V)		**263,538,418,425**	**301,127,220,984.93**	**37,588,802,559.93**

2. ANGGARAN BIAYA/PENGELUARAN.

Anggaran Biaya/Pengeluaran pada RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023, seperti pada Tabel 3.22. berikut.

Tabel 3.22. Anggaran Biaya/Pengeluaran pada RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023

Program : Peningkatan Pelayanan BLUD		
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan		
Indikator	**Tolok ukur kinerja**	**Target kinerja**
Input	1. SDM 2. Sarana/Prasaana Alat 3. BHP 4. Biaya	100%
Output	1. Pelayanan: Kunjungan Tindakan Non Operatif Tindakan Operatif Asuhan Keperawatan Tindakan Khusus Elektromedik 2. Keuangan: Administrasi/Karcis Tindakan Non Operatif Dan Operatif Asuhan Keperawatan Tindakan Khusus Elektromedik	100%

Sedangkan rincian Belanja Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Perubahan RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023, seperti pada Tabel 3.23. berikut.

Tabel 3.23. Rincian Belanja Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Perubahan RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023

No.	Uraian	Rincian Biaya		Jumlah Anggaran Sebelum (Rp)	Jumlah Anggaran Setelah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
		Volume	Satuan			
I	**BIAYA OPERASIONAL**			**158,501,316,960**	**164,318,335,582.93**	**5,817,018,622.93**
A.	**Biaya Pelayanan**			**130,279,845,420**	**144,518,335,582.93**	**14,238,490,162.93**
	1. **Biaya Pegawai**			**15,232,736,844**	**15,232,736,844**	**-**
	1. Gaji dan tunjangan pegawai non PNS	1	Tahun	15,232,736,844	15,232,736,844	-
	2. **Biaya Bahan**			**41,000,000,000**	**44,830,000,000**	**3,830,000,000.00**
	1. Biaya obat dan BHP medis	1	Tahun	33,600,000,000	37,300,000,000	3,700,000,000.00
	2. Biaya Alkes (BHP, Kalibrasi, dll)	1	Tahun	2,400,000,000	2,000,000,000	(400,000,000.00)
	3. Biaya bahan makan pasien	1	Tahun	3,000,000,000	3,030,000,000	30,000,000.00
	4. Biaya darah PMI	1	Tahun	2,000,000,000	2,500,000,000	500,000,000.00
	3. **Biaya Jasa Pelayanan**			**61,097,108,576**	**69,505,598,739**	**8,408,490,162.93**
	1. Pembayaran Jasa Pelayanan	1	Tahun	60,000,000,000	67,500,000,000	7,500,000,000.00
	2. Pembayaran Jasa Pelayanan Poli Eksekutif	1	Tahun	1,097,108,576	2,005,598,738.93	908,490,162.93
	4. **Biaya Jasa Pemeliharaan**			**1,500,000,000**	**1,050,000,000**	**(450,000,000.00)**
	1. Biaya pemeliharaan dan suku cadang alkes	1	Tahun	1,500,000,000	1,050,000,000	(450,000,000.00)
	5. **Biaya Barang dan Jasa**			**11,250,000,000**	**13,400,000,000**	**2,150,000,000.00**
	1. Biaya perlengkapan ruang rawat inap	1	Tahun	250,000,000	150,000,000	(100,000,000.00)
	2. Biaya linen	1	Tahun	200,000,000	250,000,000	50,000,000.00
	3. Biaya cetak	1	Tahun	1,200,000,000	1,000,000,000	(200,000,000.00)
	4. Biaya gas (medis)	1	Tahun	4,800,000,000	8,000,000,000	3,200,000,000.00
	5. Biaya KSO	1	Tahun	4,800,000,000	4,000,000,000	(800,000,000.00)
						-
	6. **Biaya Lain-Lain**			**200,000,000**	**500,000,000**	**300,000,000.00**
	1. Biaya pelayanan pasien rujukan	1	Tahun	200,000,000	500,000,000	300,000,000.00
						-
B.	**Biaya Umum dan Adminsitrasi**			**28,221,471,540**	**19,800,000,000**	**(8,421,471,540.00)**
	1. **Biaya Pegawai**			**1,850,000,000**	**2,200,000,000**	**350,000,000.00**
	1. Pembayaran Honorarium	1	Tahun	1,650,000,000	2,000,000,000	350,000,000.00
	2. Biaya Iuran JKN	1	Tahun	200,000,000	200,000,000	-
	2. **Biaya Administrasi Kantor**			**2,471,564,400**	**2,375,000,000**	**(96,564,400.00)**
	1. Biaya benda pos dan pengiriman	1	Tahun	25,000,000	100,000,000	75,000,000.00
	2. Biaya Alat Tulis Kantor	1	Tahun	1,500,000,000	500,000,000	(1,000,000,000.00)
	3. Biaya Cetak dan penggandaan	1	Tahun	50,000,000	200,000,000	150,000,000.00
	4. Biaya Kepustakaan	1	Tahun	25,000,000	5,000,000	(20,000,000.00)
	5. Biaya pakaian dinas dan atribut	1	Tahun	250,000,000	150,000,000	(100,000,000.00)
	6. Biaya pelatihan	1	Tahun	300,000,000	400,000,000	100,000,000.00
	7. Biaya perjalanan dinas luar daerah	1	Tahun	200,000,000	350,000,000	150,000,000.00
	8. Biaya Dokumentasi	1	Tahun	50,000,000	50,000,000	-
	9. Biaya Perizinan & Keanggotaan	1	Tahun	71,564,400	120,000,000	48,435,600.00
	10. Pengembangan Inovasi Rumah Sakit	1	Tahun	500,000,000	500,000,000	-
	3. **Biaya Pemeliharaan**			**2,500,000,000**	**2,500,000,000**	-
	1. Biaya pemeliharaan Gedung	1	Tahun	1,500,000,000	1,500,000,000	-
	2. Biaya pemeliharaan instalasi/jaringan	1	Tahun	100,000,000	100,000,000	-
	3. Biaya pemeliharaan kendaraan	1	Tahun	250,000,000	250,000,000	-
	4. Biaya pemeliharaan teknologi informasi	1	Tahun	100,000,000	100,000,000	-
	5. Biaya pemeliharan alat kantor dan RT	1	Tahun	550,000,000	550,000,000	-

	4. **Biaya Barang dan Jasa**			**10,650,000,000**	**10,575,000,000**	**(75,000,000.00)**
	1. Biaya bahan pembersih dan alat kebersihan	1	Tahun	240,000,000	400,000,000	160,000,000.00
	2. Biaya bahan bakar (BBM)	1	Tahun	600,000,000	400,000,000	(200,000,000.00)
	3. Biaya bahan gas	1	Tahun	240,000,000	100,000,000	(140,000,000.00)
	4. Biaya bahan dan alat dapur	1	Tahun	100,000,000	70,000,000	(30,000,000.00)
	5. Biaya pengisian tabung pemadam kebakaran	1	Tahun	100,000,000	200,000,000	100,000,000.00
	6. Biaya peralatan listrik dan elektronik	1	Tahun	300,000,000	200,000,000	(100,000,000.00)
	7. Biaya peralatan kantor dan RT	1	Tahun	350,000,000	250,000,000	(100,000,000.00)
	8. Biaya Perlengkapan Kantor	1	Tahun	250,000,000	250,000,000	-
	9. Biaya jasa konsultan	1	Tahun	130,000,000	150,000,000	20,000,000.00
	10. Biaya jasa pengembangan SIMRS dan RM	1	Tahun	150,000,000	200,000,000	50,000,000.00
	11. Biaya jasa kebersihan	1	Tahun	2,400,000,000	2,500,000,000	100,000,000.00
	12. Biaya jasa laundry	1	Tahun	1,500,000,000	2,000,000,000	500,000,000.00
	13. Biaya jasa pemeriksaan air,udara, gas	1	Tahun	100,000,000	105,000,000	5,000,000.00
	14. Biaya listrik	1	Tahun	3,000,000,000	2,000,000,000	(1,000,000,000.00)
	15. Biaya air	1	Tahun	30,000,000	20,000,000	(10,000,000.00)
	16. Biaya TV, telepon dan internet	1	Tahun	60,000,000	330,000,000	270,000,000.00
	17. Biaya Makan Minum Karyawan	1	Tahun	200,000,000	400,000,000	200,000,000.00
	18. Jasa Security Guard	1	Tahun	900,000,000	1,000,000,000	100,000,000.00
	5. **Biaya Promosi**			**300,000,000**	**300,000,000**	**-**
	1. Biaya Promosi	1	Tahun	300,000,000	300,000,000	-
	6. **Biaya Umum dan Administrasi**			**450,000,000**	**350,000,000**	**(100,000,000.00)**
	1. Biaya Bantuan Sembako Karyawan Rumah	1	Tahun	450,000,000	350,000,000	(100,000,000.00)
	Sakit					
	7. **Biaya Lain-lain**	1	Tahun	**9,999,907,140**	**1,500,000,000**	**(8,499,907,140.00)**
II	**BIAYA MODAL**			**1,498,683,040**	**24,949,397,067**	**23,450,714,027.00**
	1. Tanah	1	Tahun	-	-	
	2. Bangunan	1	Tahun	-	12,313,739,096	12,313,739,096.00
	3. Peralatan, Mesin dan Kendaraan	1	Tahun	1,498,683,040	11,510,117,971	10,011,434,931.00
	4. Instalasi, Jalan, Jaringan dan Irigasi	1	Tahun	-	1,125,540,000	1,125,540,000.00
	5. Sarana dan prasarana	1	Tahun	-	-	-
	Jumlah (I+II)			**160,000,000,000**	**189,267,732,649.93**	**29,267,732,649.93**
III	**PENGELUARAN PENDANAAN/PEMBIAYAAN**			-	**-**	**-**
	1. Hutang Pokok			-	-	**-**
	2. Bunga dan Administrasi			-	-	**-**
	3. Komisi, Provisi, denda			-	-	**-**
	JUMLAH (I+II+III)			**160,000,000,000**	**189,267,732,649.93**	**29,267,732,649.93**

H. AMBANG BATAS RENCANA BISNIS ANGGARAN.

Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA dan memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional sesuai dengan Permendagri 79 tahun 2018 pasal 75 ayat (2), meliputi:

a. Kecendrungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
b. Kecendrungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.

Ambang Batas Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Perubahan RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023, seperti pada Tabel 3.24. berikut.

Tabel 3.24. Ambang Batas Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Perubahan RSUD Kota Mataram

Tahun	Anggaran	Realisasi/Prognosa	Selisih	Prosentase
2021	140.000.000.000	195.483.227.307	55.483.227.307	40%
2022	164.851.653.651	209.274.761.983	44.423.108.332	27%
2023	180.000.000.000	215.086.762.166	35.086.762.166	19%
			JUMLAH	86%
			Ambang Batas	**29%**

I. PERKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN REALISASI BELANJA

Perkiraan Maju Pendapatan dan Realisasi Belanja RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023, seperti pada Tabel 3.25. berikut.

Tabel 3.25. Perkiraan Maju Pendapatan dan Realisasi Belanja RSUD Kota Mataram pada Tahun 2023

Tahun	PENDAPATAN	REALISASI BELANJA
TA. 2021	195.483.227.307	194.785.280.565
TA. 2022	209.274.761.983	204.858.682.984
TA. 2023	215.086.762.166	214.932.085.403
TA. 2024	226.218.452.011	225.005.487.822
TA. 2025	236.020.219.441	235.078.890.241

1. Anggaran Biaya/Pengeluaran APBD Perubahan dan BLUD Perubahan TA.2023 RSUD Kota Mataram, seperti pada Tabel 3.26. berikut.

Tabel 3.26. Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan TA. 2023

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2023

Formulir RKPA-BELANJA SKPD

Organisasi : 102.0.00.0.00.03.0000 RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**200,420,715,217**	**63,117,703,208**	**0**	**0**	**263,538,418,425**	**210,265,115,044**	**90,862,105,941**	**0**	**0**	**301,127,220,985**	**37.588.802.560**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**191,417,521,517**	**1,498,683,040**	**0**	**0**	**192,916,204,557**	**200,355,610,050**	**24,949,397,067**	**0**	**0**	**225,305,007,117**	**32.388.802.560**	
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**25,927,211,885**	**0**	**0**	**0**	**25,927,211,885**	**29,207,820,995**	**0**	**0**	**0**	**29,207,820,995**	**3.280.609.110**	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,927,211,885	0	0	0	25,927,211,885	29,207,820,995	0	0	0	29,207,820,995	3.280.609.110	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**400,000,000**	**0**	**0**	**0**	**400,000,000**	**200,000,000**	**0**	**0**	**0**	**200,000,000**	**(200.000.000)**	
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			400,000,000	0	0	0	400,000,000	200,000,000	0	0	0	200,000,000	(200.000.000)	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**6,588,992,672**	**0**	**0**	**0**	**6,588,992,672**	**6,629,453,472**	**0**	**0**	**0**	**6,629,453,472**	**40.460.800**	
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,588,992,672	0	0	0	6,588,992,672	6,629,453,472	0	0	0	6,629,453,472	40.460.800	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**158,501,316,960**	**1,498,683,040**	**0**	**0**	**160,000,000,000**	**164,318,335,583**	**24,949,397,067**	**0**	**0**	**189,267,732,650**	**29.267.732.650**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Pendapatan dari BLUD			158,501,316,960	1,498,683,040	0	0	160,000,000,000	164,318,335,583	24,949,397,067	0	0	189,267,732,650	29.267.732.650	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					BLUD (RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM)															
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**9,003,193,700**	**61,619,020,168**	**0**	**0**	**70,622,213,868**	**9,909,504,994**	**65,912,708,874**	**0**	**0**	**75,822,213,868**	**5.200.000.000**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**9,003,193,700**	**61,619,020,168**	**0**	**0**	**70,622,213,868**	**9,909,504,994**	**65,912,708,874**	**0**	**0**	**75,822,213,868**	**5.200.000.000**	
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya (RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM)	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar			0	61,619,020,168	0	0	61,619,020,168	0	64,912,708,874	0	0	64,912,708,874	3.293.688.706	
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			0	0	0	0	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	1000.000.000	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin (RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			4,999,083,000	0	0	0	4,999,083,000	5,905,394,294	0	0	0	5,905,394,294	906.311.294	
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	DBH CHT			4,004,110,700	0	0	0	4,004,110,700	4,004,110,700	0	0	0	4,004,110,700	0	
					(RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM)															

BAB IV
PROYEKSI KEUANGAN TAHUN YANG AKAN DATANG

A. PROYEKSI PENDAPATAN.

Proyeksi pendapatan RSUD Kota Mataram dari Tahun 2021 sampai Tahun 2026, seperti pada Tabel 4.1. berikut.

Tabel 4.1. Proyeksi pendapatan RSUD Kota Mataram
(Tahun 2021 – 2026)

No.	Komponen	Proyeksi Operasional					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
PENDAPATAN							
4	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**112,513,270,790.28**	**135,019,465,939**	**154,689,299,277.77**	**162,423,764,241.66**	**170,544,952,453.74**	**179,072,200,076.43**
4.1.	**PENERIMAAN RUMAH SAKIT UMUM**	**112,513,270,790.28**	**135,019,465,939**	**154,689,299,277.77**	**162,423,764,241.66**	**170,544,952,453.74**	**179,072,200,076.43**
4.1.1.	**Penerimaan Pelayanan Pasien Umum**	**21,556,756,829**	**19,657,969,796**	**18,477,137,483.93**	**19,400,994,358.13**	**20,371,044,076.03**	**21,389,596,279.83**
1.	Layanan Rawat Jalan	1,210,336,154	1,149,943,401	958,967,130	1,006,915,486.50	1,057,261,260.83	**1,110,124,323.87**
2.	Layanan Rawat Inap	8,267,813,116	6,474,342,869	6,571,213,568	6,899,774,246.40	7,244,762,958.72	**7,607,001,106.66**
3.	Layanan Rawat IGD	1,589,189,269	1,392,973,434	1,229,499,787	1,290,974,776.35	1,355,523,515.17	**1,423,299,690.93**
4.	Layanan Laboratorium	1,953,056,915	1,817,667,155	1,554,134,422	1,631,841,143.10	1,713,433,200.26	**1,799,104,860.27**
5.	Layanan Radiologi	884,912,731	895,609,760	427,853,497	449,246,171.85	471,708,480.44	**495,293,904.46**
6.	Layanan Bedah Sentral	1,323,330,567	916,671,521	643,892,999	676,087,648.95	709,892,031.40	**745,386,632.97**
7.	Layanan Farmasi	3,450,924,150	3,123,872,891	2,718,275,812	2,854,189,602.60	2,996,899,082.73	**3,146,744,036.87**
8.	Layanan Nicu	438,653,859	365,550,098	168,528,983	176,955,432.15	185,803,203.76	**195,093,363.95**
9	Layanan Picu	190,136,444	138,637,720	62,899,158	66,044,115.90	69,346,321.70	**72,813,637.78**
10.	Layanan ICU	500,937,862	255,527,034	352,970,524	370,619,050.20	389,150,002.71	**408,607,502.85**
11.	Layanan ICCU	214,369,490	116,708,704	14,631,480	15,363,054.00	16,131,206.70	**16,937,767.04**
12.	Layanan STR	239,264,210	237,464,464	125,948,061	132,245,464.05	138,857,737.25	**145,800,624.12**
13.	Layanan ITM	91,863,754	84,317,435	61,732,239	64,818,850.95	68,059,793.50	**71,462,783.17**
14.	Layanan IPJ	16,056,000	9,315,000	38,254,000	40,166,700.00	42,175,035.00	**44,283,786.75**
15.	Hemodialisa	36,476,132	24,563,150	50,715,192	53,250,951.60	55,913,499.18	**58,709,174.14**
16.	Hiperbarik	108,343,900	123,277,105	140,547,207	147,574,567.35	154,953,295.72	**162,700,960.50**
17.	BDRS	260,706,000	235,990,000	138,271,300	145,184,865.00	152,444,108.25	**160,066,313.66**
18.	Poli Sore	199,712,562	50,559,332	2,815,548,805	2,956,326,245.25	3,104,142,557.51	**3,259,349,685.39**
19.	Poli Eksekutif	296,846,601	1,953,996,150	165,000	173,250.00	181,912.50	**191,008.13**
20.	Instalasi Gizi	450,000	370,000	164,872,596	173,116,225.80	181,772,037.09	**190,860,638.94**
21.	Ambulance	127,717,113	118,630,223	958,967,130	1,006,915,486.50	1,057,261,260.83	**1,110,124,323.87**
22.	Persalinan	155,660,000	138,221,500	95,580,000	100,359,000.00	105,376,950.00	**110,645,797.50**
23.	Insiminasi	-	11,187,000	20,850,000	21,892,500.00	22,987,125.00	**24,136,481.25**
24.	Home Care	-	22,573,850	94,161,724	98,869,810.20	103,813,300.71	**109,003,965.75**

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	MEMS	-	-	12,431,250	13,052,812.50	13,705,453.13	**14,390,725.78**
26.	MCU	-	-	15,192,750	15,952,387.50	16,750,006.88	**17,587,507.22**
4.1.2.	**Penerimaan Pelayanan dari Jaminan**	**87,714,803,431**	**107,698,322,131**	**129,351,940,999**	**142,610,514,951**	**142,610,514,951**	**149,741,040,699**
1	Penerimaan BPJS	86,947,021,710	106,010,479,769	127,900,068,830	141,009,825,885	141,009,825,885	**148,060,317,179**
2	Penerimaan Inhealth	9,411,476	29,949,494	62,675,141	69,099,343	69,099,343	**72,554,310**
3	Jasa Raharja	733,322,895	848,353,263	1,100,553,506	1,213,360,240	1,213,360,240	**1,274,028,252**
4	Jamsostek		85,020,070	70,521,045	77,749,452	77,749,452	**81,636,925**
5	Smile Train		16,500,000	33,000,000	36,382,500	36,382,500	**38,201,625**
6	BNI Life		685,710,178	5,323,448	5,869,101	5,869,101	**6,162,556**
7	Yayasan Kesehatan		22,309,357	56,454,614	62,241,212	62,241,212	**65,353,273**
8	PT. PP		-	15,082,761	16,628,744	16,628,744	**17,460,181**
9	Fullerton		-	28,476,955	31,395,843	31,395,843	**32,965,635**
10	Gum		-	9,756,000	10,755,990	10,755,990	**11,293,790**
11	Gerung		-	26,900,000	29,657,250	29,657,250	**31,140,113**
12	PT. PLN		-	43,128,699	47,549,391	47,549,391	**49,926,860**
13	RS Siti Hajar		-	-	-	-	**-**
14	Owlexa		-	-	-	-	**-**
15	Mandiri		-	-	-	-	**-**
4.1.3.	**Penerimaan Pelayanan pasien tidak mampu**	**,968,471,389**	**6,833,003,970**	**5,999,635,511**	**6,614,598,151**	**6,614,598,151**	**6,945,328,058**
1	Dikes Kota	1,782,305,596	5,885,444,814	5,716,338,583	6,302,263,288	6,302,263,288	**6,617,376,452**
2	Dikes Lombok Timur	-	75,158,100	19,483,700	21,480,779	21,480,779	**22,554,818**
3	Dikes Lombok Barat	-	246,720,022	-			**0**
4	Dikes Lombok Utara	170,187,493	75,775,426	-			**0**
5	Dikes Lombok Tengah	15,978,300	11,820,900	73,696,598	81,250,499	81,250,499	**85,313,024**
6	BKSPJK	1,968,471,389	538,084,708	190,116,630	209,603,585	209,603,585	**220,083,764**
4.1.4.	Lain lain Pendapatan RSU yang syah	1,273,239,141	830,170,042	860,585,284	948,795,276	948,795,276	**996,235,039**
1	Penerimaan Jasa Giro	24,236,769	29,179,602	258,897,505	285,434,499	285,434,499	**299,706,224**
2	Pendidikan dan Diklat	817,461,000	318,600,000	373,765,000	412,075,913	412,075,913	**432,679,708**
3	Lain lain Pendapatan asli daerah yang sah	200,529,241	396,390,440	115,716,529	127,577,473	127,577,473	**133,956,347**
4	Taxi	40,750,000	9,000,000	9,000,000	9,922,500	9,922,500	**10,418,625**
5	Parkir	11,500,000	77,000,000	55,206,250	60,864,891	60,864,891	**63,908,135**
6	Sewa	178,762,131	-	48,000,000	52,920,000	52,920,000	**55,566,000**
II	**JUMLAH PENDAPATAN**	**112,513,270,790**	**135,019,465,939**	**154,689,299,278**	**170,544,952,454**	**170,544,952,454**	**179,072,200,077**

B. PROYEKSI NERACA.

Proyeksi Neraca RSUD Kota Mataram dari Tahun 2021 sampai Tahun 2026, seperti pada Tabel 4.2. berikut.

Tabel 4.2. Proyeksi Neraca RSUD Kota Mataram
(Tahun 2021 – 2026)

No	Komponen	Proyeksi Neraca					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. ASET							
A.	**Aset Lancar**						
1	Kas dan Bank	5.688.372.982	6.131.606.574	6.364.798.624	6.584.685.284	7.114.417.194	7.755.253.893
2	Piutang Layanan	5.000.000.000	10.051.453.063	12.564.316.328	15.705.395.411	19.631.744.263	24.539.680.329
3	Piutang Karyawan	84.195.046	92.614.551	101.034.055	109.453.560	117.873.064	126.292.569
4	Piutang Lain-lain	1.034.337.778	1.137.771.556	1.241.205.334	1.344.639.111	1.448.072.889	1.551.506.667
5	Persediaan	2.450.000.000	4.925.212.001	6.156.515.001	7.695.643.751	9.619.554.689	12.024.443.361
	Jumlah Aset Lancar	14.256.905.806	22.338.657.744	26.427.869.342	31.439.817.117	37.931.662.099	45.997.176.819
B.	**Aset Tetap**						
1	Tanah	11.490.000.000	11.490.000.000	11.490.000.000	11.490.000.000	11.490.000.000	11.490.000.000
2	Peralatan dan Mesin	80.240.678.994	85.240.678.994	92.480.487.638	101.053.598.005	108.707.554.712	117.891.902.661
3	Gedung dan Bangunan	71.461.699.690	96.461.699.690	104.151.275.547	133.225.555.829	160.807.506.211	209.777.434.059
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.178.191.000	1.678.191.000	1.192.625.323	1.684.978.432	1.204.087.512	1.690.111.426
6	Aktiva tetap lainnya	242.145.000	242.499.365	242.800.759	243.082.077	243.320.630	243.530.241
7	Konstruksi dan Pengerjaan	849.921.360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap	165.462.636.044	195.113.069.049	209.557.189.267	247.697.214.343	282.452.469.066	341.092.978.386
C.	**Aset Lain-lain**						
	Aset tak terwujud	199.812.800	399.500.000	545.000.000	675.000.000	798.500.000	927.800.000
	Jumlah Aset lainnya	199.812.800	399.500.000	545.000.000	675.000.000	798.500.000	927.800.000
II. KEWAJIBAN							
A.	**Kewajiban Jangka Pendek**						
1	Hutang Perhitungan Pihak ke III	1.225.000.000	2.462.606.000	3.078.257.500	3.847.821.876	4.809.777.344	6.012.221.681
2	Uang muka dari kas daerah						
3	Pendapatan yang diterima di muka						
4	Hutang jangka pendek lainnya						
B	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek**						
1	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat						
2	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah lainnya						
3	Utang Dalam Negeri-Lembaga Keu Bank						
4	Utang Dalam Negeri- Lembaga Keu Bukan Bank						
5	Utang Dalam Negeri – Obligasi						
6	Utang jangka Panjang Lainya						
C.	**Kewajiban Jangka Panjang**						
	Jumlah Kewajiban	1.225.000.000	2.462.606.000	3.078.257.500	3.847.821.876	4.809.777.344	6.012.221.681
III. EKUITAS DANA							
	Ekuitas dana Lancar						
1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	4.463.372.982	3.669.000.573	3.286.541.124	2.736.863.408	2.304.639.849	1.743.032.212
2	Cadangan Piutang	6.118.532.824	11.281.839.170	13.906.555.717	17.159.488.082	21.197.690.216	26.217.479.565
3	Cadangan persediaan	2.450.000.000	4.925.212.001	6.156.515.001	7.695.643.751	9.619.554.689	12.024.443.361
4	Dana yg hrs disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek						
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	13.031.905.806	19.876.051.744	23.349.611.842	27.591.995.241	33.121.884.754	39.984.955.139
	Ekuitas dan Investasi						
1	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	165.462.636.044	195.113.069.049	209.557.189.267	247.697.214.343	282.452.469.066	341.092.978.386
2	Diinvestasikan Dalam Aset lainnya	199.812.800	399.500.000	545.000.000	675.000.000	798.500.000	927.800.000
	Jumlah Ekuitas Dan Investasi	**165.662.448.844**	**195.512.569.049**	**210.102.189.267**	**248.372.214.343**	**283.250.969.066**	**342.020.778.386**

C. PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL.

Proyeksi Laporan Operasional RSUD Kota Mataram dari Tahun 2021 sampai Tahun 2026, seperti pada Tabel 4.3. berikut.

Tabel 4.3. Proyeksi Laporan Operasional RSUD Kota Mataram
(Tahun 2021 – 2026)

	PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL						
No.	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	PENDAPATAN	124.751.896.877,00	143.398.661.480,03	168.590.648.387,91	182.077.900.258,94	196.644.132.279,66	212.392.462.862,03
1	Pendapatan Jasa Layanan	105.971.465.877,00	119.232.372.463,03	128.770.962.260,07	139.072.639.240,88	150.198.450.380,15	162.214.326.410,56
2	Pendapatan APBD	18.780.431.000,00	24.104.789.017,00	39.319.686.127,84	42.465.261.018,06	45.862.481.899,51	49.531.480.451,47
3	Pendapatan APBN	-	-	-			
4	Pendapatan Usaha Lainnya/KSO	58.971.000,00	61.500.000,00	500.000.000,00	540.000.000,00	583.200.000,00	646.656.000,00
B	BIAYA	64.465.019.086,00	110.889.471.632,00	119.928.511.868,87	131.921.363.055,76	145.113.499.361,33	159.624.849.297,46
1	Biaya Pegawai	11.478.061.894,00	15.950.381.626,00	18.583.424.580,00	20.441.767.038,00	22.485.943.741,80	24.734.538.115,98
2	Biaya Barang dan jasa	52.986.957.192,00	94.939.090.006,00	101.345.087.288,87	111.479.596.017,76	122.627.555.619,53	134.890.311.181,48
C	Surplus/Defisit sebelum Pos Keuntungan/	60.286.877.791,00	32.509.189.848,03	48.662.136.519,04	50.156.537.203,19	51.530.632.918,33	52.767.613.564,57
	Kerugian						
	Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar		-	-			
	Rugi Penjualan Aset Non Lancar		-	-			
	Rugi Penurunan Nilai		-	-			
	Lain-lain		-	-			
D	Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	60.286.877.791,00	32.509.189.848,03	48.662.136.519,04	50.156.537.203,19	51.530.632.918,33	52.767.613.564,57
	Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa		-				
	Biaya dan Kejadian Luar Biasa		-				
	Surplus/Defisit Tahun Berjalan	60.286.877.791,00	32.509.189.848,03	48.662.136.519,04	50.156.537.203,19	51.530.632.918,33	52.767.613.564,57

D. PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS

Proyeksi Laporan Arus KAs RSUD Kota Mataram dari Tahun 2021 sampai Tahun 2026, seperti pada Tabel 4.4. berikut.

Tabel 4.4. Proyeksi Laporan Arus Kas RSUD Kota Mataram
(Tahun 2021 – 2026)

No	Komponen	PROYEKSI ARUS KAS					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Arus Kas dari Aktivitas Operasional							
1	Penerimaan dari layanan	30.000.000.000	60.308.718.376	75.385.897.970	94.232.372.463	117.790.465.579	147.238.081.973
2	Penerimaan Piutang/Tagihan	5.000.000.000	10.051.453.063	12.564.316.328	15.705.395.411	19.631.744.263	24.539.680.329
3	**Pengeluaran operasional**	**33.775.000.000**	**67.897.565.439**	**84.871.956.798**	**106.089.945.998**	**132.612.432.497**	**165.765.540.622**
	- Biaya Pegawai/Operasional APBD	-	-	-	-	-	-
	- Biaya bahan/barang/jasa	14.700.000.000	29.551.272.004	36.939.090.006	46.173.862.507	57.717.328.134	72.146.660.167
	- Pembayaran Utang Pihak III	1.225.000.000	2.462.606.000	3.078.257.500	3.847.821.876	4.809.777.344	6.012.221.681
	- Persediaan	2.450.000.000	4.925.212.001	6.156.515.001	7.695.643.751	9.619.554.689	12.024.443.361
	- Biaya Jasa Pelayanan	13.200.000.000	26.535.836.086	33.169.795.107	41.462.243.884	51.827.804.855	64.784.756.068
	- Utang Jasa Pelayanan	2.200.000.000	4.422.639.348	5.528.299.184	6.910.373.981	8.637.967.476	10.797.459.345
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	1.225.000.000	2.462.606.000	3.078.257.500	3.847.821.876	4.809.777.344	6.012.221.681
II. Arus Kas dari Aktivitas Investasi							
1	Hasil penjualan Aset Tetap	-	-	-	-	-	-
2	Hasil Penjualan Aset lain-lain	-	-	-	-	-	-
3	Hasil Investasi	-	-	-	-	-	-
4	Perolehan Aset Tetap	47.298.575.529	28.737.363.166	41.819.766.282	38.806.421.196	44.344.403.113	45.732.953.370
5	Pembelian Investasi	-	-	-	-	-	-
	Arus Kas Bersih yang diinginkan untuk Aktivitas Investasi	47.298.575.529	28.737.363.166	41.819.766.282	38.806.421.196	44.344.403.113	45.732.953.370
III. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan							
1	Tambahan Ekuitas	11.146.620.441	13.247.779.944,87	15.980.026.335,53	18.732.649.323,02	22.008.341.490,18	25.294.609.007,56
2	Penerimaan Hibah	-	-	-	-	-	-
3	Penerimaan APBD	46.386.037.992	49.343.132.090	75.104.789.016,50	86.677.508.421,51	123.639.478.247,90	149.772.604.422,33
4	Penerimaan APBN	1.600.000.000	1.643.292.489,60	1.685.332.555,73	1.715.949.579,50	1.743.435.717,41	1.764.058.162,69
5	Perolehan Pinjaman	-	-				
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	59.132.658.433	64.234.204.524	92.770.147.908	107.126.107.324	147.391.255.455	176.831.271.593
	KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS	13.059.082.904	37.959.447.359	54.028.639.126	72.167.508.003	107.856.629.687	137.110.539.903
	KAS DAN SETARA KAS AWAL	4.463.372.982	11.301.984.047	26.404.127.233	34.586.089.535	37.363.759.138	35.578.995.262
	JUMLAH SALDO KAS	**17.522.455.886**	**49.261.431.405**	**80.432.766.359**	**106.753.597.538**	**145.220.388.825**	**172.689.535.165**

E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) TAHUN BERJALAN

1. PENDAHULUAN.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terdiri atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya.

Sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 33 Tahun 2004 dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram, yang diubah dengan Peraturan Walikota *Nomor* 48/PERT/2008 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggungjawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

a. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2016 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17/2003, UU No.

33/2004, PP No 58/2005, PP No. 08/2006, PP No. 71/2010, dan Peraturan Walikota *Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram, yang diubah dengan Peraturan Walikota* Nomor *48/PERT/2008 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram.* Tujuan pelaporan keuangan ini adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas publik dengan:

1). menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana;
2). menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam
3). rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
4). menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5). Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Kota Mataram dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Kota Mataram selaku entitas akuntansi.

b. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Mataram diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1). Undang - Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
2). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

3). Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
7). Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 4578);
8). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.;
9). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan pertama dan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11). Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 No.3 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

12). Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2009 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 6 Seri E);

13). Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 tahun 2014 tanggal 22 Desember Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

14). Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 tahun 2015 tanggal 19 Nopember Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

15). Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011, Nomor 2, Seri D) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013, Nomor 2, Seri D);

16). Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Kelas B Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 3 Seri D);

17). Peraturan Walikota Nomor 48/PERT/2008 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram;

18). Peraturan Walikota Nomor 48/PERT/2008 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram;

19). Peraturan Walikota Mataram Nomor 13/2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mataram.

c. Sestematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

A. Pendahuluan.
   1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
   2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
   3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

B. Kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja keuangan
   1. Kebijakan keuangan
   2. Indikator pencapaian target kinerja keuangan

C. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
   1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
   2. Hambatan dan kendala pencapaian target

D. Kebijakan akuntansi
   1. Entitas pelaporan keuangan SKPD
   2. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan
   3. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
   4. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
   5. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

E. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
   1. Penjelasan Pos Pendapatan
   2. Penjelasan Pos Belanja
   3. Penjelasan Pos Aset
   4. Penjelasan Pos Kewajiban
   5. Penjelasan Pos Ekuitas dana
   6. Penjelasan Pos Pendapatan LO
   7. Penjelasan Pos Beban LO
   8. Penjelasan Pos surplus/defisit LO
   9. Penjelasan Pos ekuitas awal
   10. Penjelasan koreksi
   11. Penjelasan ekuitas akhir
   12. Pengungkapan Informasi sehubungan dengan penerapan basis akrual

F. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

2. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN.

a. Kebijakan Keuangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram tahun anggaran 2022 disahkan melalui Perda Nomor: 8 Tahun 2021, sedangkan APBD Perubahan disahkan melalui Perda Nomor 3 Tahun 2022.

Terkait dengan perubahan anggaran pendapatan dan belanja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram Kota Mataram, seperti pada Tabel 4.5. berikut:

Tabel 4.5. Anggaran dan Belanja Daerah RSUD Kota Mataram
Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Anggaran murni (Rp.)	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	% Kenaikan/ Penurunan
I	**Pendapatan**			
1	Hasil Retribusi Daerah	-	-	-
2	Lain-Lain PAD	160.000.000.000	180.000.000.000	13%
	Jumlah Pendapatan	**160.000.000.000**	**180.000.000.000**	**13%**
II	**Belanja**			
3	Belanja Operasional	200.420.715.217	210.265.115.044	5%
4	Belanja Modal	63.117.703.208	90.862.105.941	44%
	Jumlah Belanja	**263.538.418.425**	**301.127.220.985**	**14%**
	Defisit/Surplus	**(103.538.418.425)**	**(121.127.220.985)**	**17%**

Menyikapi kebijakan keuangan Pemerintah Kota Mataram dengan adanya perubahan APBD tahun 2023tersebut diatas, beberapa strategi yang ditempuh oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram antara lain:

1). Upaya peningkatan pendapatan yang menjadi *leading sector*Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram Kota Mataram, telah melakukan kebijakan antara lain:
   a). Memperbaiki dan meningkatkan fasilitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram;
   b). Meningkatkan kemampuan tenaga medis dan menambah tenaga dokter spesialis melalui pelatihan dan kursus;

c). Menambah pos-pos pendapatan atau fasilitas pelayanan.

d). Membuat inovasi terkait pelayanan Rumah Sakit

2). Upaya penghematan belanja, dengan menempuh kebijakan antara lain:

a). Mengurangi belanja barang dan jasa;

b). Memanfaatkan SDM yang ada secara maksimal;

c). Menggunakan peralatan dan perlengkapan kantor secara optimal;

d). Memelihara peralatan dan perlengkapan kantor dan bekerja dengan penuh tanggungjawab.

Ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan menjadi faktor pembatas dalam mewujudkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram antara lain:

Kesulitan dalam mengalokasikan dana karena banyak kegiatan yang di ajukan oleh masing-masing bagian dan bidang;

1). Pelaksanaan kegiatan kurang optimal karena masih kurangnya sarana pendukung.

b. Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Indikator apencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dalam konteks penganggaran berdasar Permendagri Nomor: 13 tahun 2006 pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram

1). *Non Program*

a). Belanja Tidak Langsung pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram terdiri dari beberapa belanja antara lain, seperti pada Tabel 4.6. berikut.

Tabel 4.6. Belanja Tidak Langsung RSUD
Kota Mataram

No.	Jenis Belanja	Jumlah (Rp.)
1	Gaji Pokok PNS	12.340.966.800
2	Tunjangan Keluarga	1.011.736.416
3	Tunjangan Jabatan	209.340.000
4	Tunjangan Fungsional	1.296.456.000
5	Tunjangan Fungsional Umum	83.520.000
6	Tunjangan Beras	743.898.240
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.603.400
8	Pembulatan Gaji	189.552
9	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.020.670.400
10	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi	1.968.960.000
11	Tambahan penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	3.031.005.600
Jumlah		**22.712.346.408**

2). *Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*

Tujuan program ini meningkatkan sarana dan prasarana serta kegiatan yang bersifat operasional Rumah sakit. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 15 kegiatan termasuk Anggaran BLUD dengan anggaran sebesar Rp 225,305,007,117,-.

3). *Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat*

Tujuan program ini meningkatnya sarana dan Prasarana serta kebutuhan Pelayanan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 75,822,213,868,-.

3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.

a. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada

pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi anggaran bulan Juni tahun 2022 dan perbandingan dengan realisasi bulan Juni tahun 2023, seperti pada Tabel 4.7. berikut.

Tabel 4.7. Realisasi Anggaran Posisi Per 30 Juni 2023
RSUD Kota Mataram

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**180.000.000.000**	**107.543.381.083,87**	**59,75**	**209.717.327.649,25**
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	180.000.000.000	107.543.381.083,87	59,75	209.717.327.649,25
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**180.000.000.000**	**107.543.381.083,87**	**59,75**	**209.717.327.649,25**
	JUMLAH PENDAPATAN	**180.000.000.000**	**107.543.381.083,87**	**59,75**	**209.717.327.649,25**
5	**BELANJA DAERAH**	**301.127.220.985**	**110.726.420.094,56**	**36,77**	**249.457.104.612,05**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**210.265.115.044**	**108.936.866.517,56**	**51,81**	**238.115.384.089,05**
5.1.01	Belanja Pegawai	44.440.557.839	13.451.537.879,00	30,27	33.616.895.020,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.824.557.205	95.485.328.638,56	57,58	204.218.725.797,05
5.1.03	Belanja Bunga	0	0,00	0,00	279.763.272,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**210.265.115.044**	**108.936.866.517,56**	**51,81**	**238.115.384.089,05**
5.2	**BELANJA MODAL**	**90.862.105.941**	**1.789.553.577,00**	**1,97**	**11.341.720.523,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.422.826.845	550.959.320,00	0,71	6.740.738.682,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.313.739.096	1.238.594.257,00	10,06	4.363.355.841,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigas	1.125.540.000	0,00	0,00	237.626.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**90.862.105.941**	**1.789.553.577,00**	**1,97**	**11.341.720.523,00**
	JUMLAH BELANJA	**301.127.220.985**	**110.726.420.094,56**	**36,77**	**249.457.104.612,05**
	SURPLUS/DEFISIT	**(121.127.220.985)**	**(3.183.039.010,69)**	**2,63**	**(39.739.776.962,80)**

b. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target.

Dalam pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataramterdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut, yaitu:

1). Kendala terkait dengan pencapaian target pendapatan antara lain :
   a). Kelengkapan administrasi bagi pasien/masyarakat yang menggunakan BPJS;
   b). Pasien tidak dapat membayarbiaya/klaim dari rumah sakit.

2). Kendala terkait dengan target efisiensi belanja antara lain disebabkan oleh :

a). Tuntutan masyarakat atas pelayanan kesehatan sehingga RSUD Kota Mataram harus terus meningkatkan fasilitas pelayanan;

b). Belum maksimalnya pendayagunaan pegawai;

c). Masih rendahnya tarif sehingga tidak dapat menutupi biaya operasional RSUD Kota Mataram.

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan, antara lain:

a). Melakukan koordinasi dengan pelaksanaan program/kegiatan untuk menentukan skala prioritas terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan yang memang benar dibutuhkan untuk saat ini;

b). Memberikan fasilitas pengaduan terhadap pasien BPJS dan membantu pengurusan kartu BPJS;

c). Memaksimalkan pendayagunaan pegawai yang sudah memiliki kemampuan dan keterampilan sehingga pelayanan terhadap tugas-tugas RSUD Kota Mataram dapat berjalan lancar.

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya eknomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan.

Sehubungan dengan berlakunya PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 1b/PERT/2007 tentang Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram maka kebijakan akuntansi juga mengalami perubahan.

a. Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan.

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mataram adalah sebagai berikut:

1). Asumsi kemandirian entitas.

Berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan.

2). Asumsi kesinambungan entitas

Berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksudkan untuk melakukan likuidasi.

3). Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*)

Berarti bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

b. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Basis akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan yang diberlakukan untuk setiap SKPD Pemerintah Kota Mataram adalah sebagai berikut:

1). Basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan LO dan beban, atau pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

2). Basis akrual untuk Pendapatan LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada

saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

3). Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

c. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan **nilai perolehan historis** dan dalam **mata uang rupiah**.Transaksi yang menggunakan **mata uang asing dikonversikan** terlebih dahulu dengan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

d. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang SAP, penerapan SAP Berbasis akrual dalam Laporan keuangan pemerintah diberlakukan

efektif untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2016. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain: pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2010 adalah sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran.

1). Pendapatan

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntasi pendapatan antara lain:

a). Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah.

b). Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah.

c). Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d). Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

e). Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang pendapatan. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan terjadi setelah periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar (SiLPA).

f). Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

2). Belanja.

a). Kebijakan akuntansi berkaitan dengan belanja daerah yaitu: Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah.

b). Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan. Apabila belanja diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

c). Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

d). Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu : belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil – transfer. Belanja Operasi diklasifikasikan atas : belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal diklasifikasikan atas : belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

b. Neraca.

1). Aset Lancar.

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar antara lain: Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan

Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Lainnya, dan Persediaan.

a). Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b). Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan.Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah.Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

c). Piutang Pajak.

Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan

piutang.

d). Piutang Retribusi.

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar sebesar nilai rupiah dari ketetapan retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi.Piutang retribusi disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan piutang.

e). Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan piutang.

f). Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan piutang. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Mejelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APIP.

g). PiutangLainnya.

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi

yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan piutang.

h). Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah alat yang digunakan untuk menyesuaikan nilai piutang sehingga didapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable* value). Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode dan disisihkan berdasarkan umur piutang.

Persentase penyisihan piutang berbeda-beda untuk masing-masing jenis piutang:

(1). Piutang Pajak.

Untuk piutang Pajak, daftar umur piutang dan penyisihan dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok umur piutang, yaitu:

- 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 10%;
- 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 25%;
- 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 50%;
- 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 75%;
- Diatas 5 (lima) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 100%.

(2). Piutang Retribusi

Untuk Piutang Retribusi, daftar umur piutang dan penyisihan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok umur piutang, yaitu:

- 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 10%;
- 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 50%;
- diatas 3 (tiga) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 100%;

i). Persediaan.

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan *(supplies)* yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Metode pencatatan persediaan selain obat-obatan dicatat menggunakan metode fisik/periodik sedangkan untuk persediaan obat-obatan dengan metode perpetual.

Pencatatan perpetual yaitu “pencatatan atas persediaan yang dilaksanakan setiap waktu, baik terhadap persediaan yang masuk maupun persdiaan yang keluar.” Dalam metode ini, pencatatan persediaan dilakukan dalam kartu persediaan yang menggambarkan persediaan sebenarnya. Sedangkan metode pencatatan periodik adalah pencatatan atas persediaan

dilakukan dengan menghitung jumlah persediaan di akhir suatu periode untuk dilakukan pembukuan.

2). Investasi Permanen.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.

a). Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kota Mataram untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah dan perolehan deviden dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dikapitalisir kembali.Penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud.

Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

b). Investasi Permanen Lainnya – Dana Bergulir

Investasi Permanen Lainnya adalah investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan kepada kelompok masyarakat untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali. Investasi permanen lainnya dicatat sebesar harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya

yang terjadi untuk memperolehnya.Investasi Dana Bergulir dinilai sebesar jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

3). Aset Tetap.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar nilai perolehan setelah dikurangi dengan penyusutan.

a). Tanah.

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan.Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan.Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan.Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

b). Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

c). Gedung dan Bangunan.

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi

peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

d). Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

e). Aset Tetap Lainnya.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap

lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan hewan/tanaman. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

f). Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

g). Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai penguramg nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional. Penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) sesuai dengan Masa manfaat dan penambahan masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan,

seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

4). Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lain-lain.

a). Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

b). Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan sebesar nilai perolehannya setelah dikurangi dengan penyusutan.

5). Kewajiban Jangka Pendek.

Suat kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu12 (dua belas)

bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi bunga pinjaman, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), utang beban dan bagian lancar utang jangka panjang.

6). Kewajiban Jangka Panjang

Semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria kewajiban jangka pendek diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.Suatu kewajiban tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, meskipun memenuhi kriteria kewajiban jangka pendek, jika:

a). Jangka waktu kewajiban adalah periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;

b). Entitas pelaporan bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang yang didukung dengan adanya suatu perjanjian tentang pendanaan kembali (*refinancing*), atau penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan diterbitkan, dimana dalam laporan keuangan subtansi kewajiban dimaksud pada tanggal pelaporan adalah kewajiban jangka panjang.

7). Ekuitas.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset pemerintah daerah dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Ekuitas pada entitas akuntansi adalah kekayaan bersih entitas akuntansi yang merupakan selisih antara aset entitas akuntansi dan kewajiban entitas akuntansi pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas pada neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

c. Laporan Operasional.

1). Pendapatan-LO

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntasi pendapatan-LO antara lain:

a). Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b). Pendapatan-LO diakui atas dasar akrual, yaitu:

- Pada saat timbulnya hak atas pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atas pendapatan atau adanya hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

c). Pencatatan pendapatan-LO berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d). Pengukuran pendapatan dengan azas bruto dapat dikecualikan apabila besaran pengurang terhadap pendapatan-Lo bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai.

e). Pengukuran pendapatan-LO menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

f). Pengembalian / koreksi atas penerimaan pendapatan-LO yang

terjadi pada periode akuntansi ataupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LO.

g). Pengembalian/koreksi pendapatan-LO yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) pada periode akuntansi dibukukan sebagi pengurang pendapatan pada periode yang sama. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan-LO yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) pada periode sebelumnya dibukukan sebagi pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

h). Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatannya antara lain : Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO, Surplus Non Operasional–LO dan Pendapatan Luar Biasa-LO dan diklasifikasikan lagi menurut jenis pendapatannya.

i). Untuk Badan Layanan Umum Daerah sebagai entitas akuntansi, pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah tersebut.

2). Beban-LO.

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan beban-LO yaitu:

a). Beban-LO adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah.

b). Beban diakui atas dasar akrual, pada saat timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan tanpa diikuti keluarnya kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar entitas akuntansi.

c). Terjadinya konsumsi aset, yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

d). Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

e). Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu dikelompokkan dalam beban operasional, beban transfer, defisit non operasional dan beban luar biasa. Berdasarkan jenisnya beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyususstan dan amortisasi, beban penyisihan piutang dan beban lain-lain.

f). Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali (*contra post*) beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

g). Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos antara lain:

1). Ekuitas Awal.

2). Surplus/defisit-LO.

3). Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan pencatatan, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

4). Ekuitas Akhir.

e. Laporan Operasional.

1). Pendapatan-LO

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntasi pendapatan-LO antara lain:

a). Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b). Pendapatan-LO diakui atas dasar akrual, yaitu :

- Pada saat timbulnya hak atas pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atas pendapatan atau adanya hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

c). Pencatatan pendapatan-LO berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d). Pengukuran pendapatan dengan azas bruto dapat dikecualikan apabila besaran pengurang terhadap pendapatan-Lo bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai.

e). Pengukuran pendapatan-LO menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

f). Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan-LO yang

terjadi pada periode akuntansi ataupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LO.

g). Pengembalian/koreksi pendapatan-LO yang sifatnya tidak berulang (non recurring) pada periode akuntansi dibukukan sebagi pengurang pendapatan pada periode yang sama. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan-LO yang sifatnya tidak berulang (non recurring) pada periode sebelumnya dibukukan sebagi pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

h). Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatannya antara lain : Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO, Surplus Non Operasional–LO dan Pendapatan Luar Biasa-LO dan diklasifikasikan lagi menurut jenis pendapatannya.

i). Untuk Badan Layanan Umum Daerah sebagai entitas akuntansi, pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah tersebut.

2). <u>Beban-LO</u>

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan beban-LO yaitu:

a). Beban-LO adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah.

b). Beban diakui atas dasar akrual, pada saat timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan tanpa diikuti keluarnya kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar entitas akuntansi.

c). Terjadinya konsumsi aset, yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

d). Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

e). Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu dikelompokkan dalam beban Operasional, Beban transfer, defisit non operasional dan beban luar biasa. Berdasarkan jenisnya beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban penyususstan dan amortisasi, beban penyisihan piutang dan beban lain-lain.

f). Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali (contra post) beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

g). Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos antara lain:

1). Ekuitas Awal

2). Surplus/defisit-LO

3). Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang erasal dari dampak kumulatis yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntasi atau koreksi atas kesalahan pencatatan, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

4). Ekuitas Akhir

5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.

a. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan.

1). Laporan Realisasi Anggaran.

a). Pendapatan.

Jumlah Pendapatan per Oktober 2023 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar *Rp.180.000.000.000,00.*, terealisasi sebesar *Rp.189.114.766.281,68* atau 105*%,* seperti pada Tabel 4.8. berikut.

Tabel 4.8. Rincian Atas Jumlah Pendapatan RSUD Kota Mataram Tahun Anggaran 2023

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2023	JUMLAH REALISASI BULAN INI	JUMLAH REALISASI S/D BULAN LALU	JUMLAH REALISASI s/d BULAN INI	SISA ANGGARAN LEBIH/KURANG	%
1	2	3	5	6	7	8	9
4	**PENDAPATAN**						
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**180,000,000,000.00**	**21,339,262,593.88**	**209,561,569,699.19**	**230,900,832,293.07**	**(50,900,832,293.07)**	**128.28%**
4.1.1.	**PENERIMAAN RUMAH SAKIT UMUM**	**180,000,000,000.00**	**21,339,262,593.88**	**209,561,569,699.19**	**230,900,832,293.07**	**(50,900,832,293.07)**	**128.28%**
1	Penerimaan Pelayanan Pasien Umum	10,500,000,000.00	1,915,960,144.91	16,180,534,572.53	18,096,494,717.44	(7,596,494,717.44)	172.35%
2	Penerimaan Pelayanan dari Jaminan	165,157,000,000.00	18,405,947,128.00	189,495,984,960.00	207,901,932,088.00	(42,744,932,088.00)	125.88%
3	Penerimaan Pelayanan pasien tidak mampu	3,600,000,000.00	986,479,766.00	2,678,970,599.00	3,665,450,365.00	(65,450,365.00)	101.82%
4	Lain lain Pendapatan RSU yang syah	743,000,000.00	30,875,554.97	1,206,079,567.66	1,236,955,122.63	(493,955,122.63)	166.48%
	Jumlah Pendapatan	**180,000,000,000.00**	**21,339,262,593.88**	**209,561,569,699.19**	**230,900,832,293.07**	**(50,900,832,293.07)**	**128.28%**
5	Pendapatan temuan Audit bepeka			101,301,000.00	101,301,000.00		
	JUMLAH PENDAPATAN	**180,000,000,000.00**	**21,339,262,593.88**	**209,662,870,699.19**	**231,002,133,293.07**	**(50,900,832,293.07)**	**128.33%**

Jumlah pendapatan tersebut, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Pendapatan Asli Daerah**, target anggaran setelah perubahan sebesar *RP.180.000.000.000* terealisasi sebesar *Rp.231.002.133.293,07* atau *128.33%.*
2. **Lain-lain Pendapatan yang Sah**, target anggaran setelah perubahan sebesar *Rp 743.000.000*. Rincian atas Lain-lain Pendapatan yang Sah tersebut, seperti pada Tabel 4.9. berikut:

Tabel 4.9. Rincian Atas Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
Tahun Anggaran Per 30 Juni 2023

UNIT PELAYANAN	SATUAN	TAHUN 2023
Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	**1 tahun**	**743,000,000**
a. Penerimaan Jasa Giro	1 tahun	120,000,000
b. Pendidikan dan Diklat	1 tahun	446,000,000
c. Sewa	1 tahun	77,000,000
d. Parkir	1 tahun	100.000.000

b). Belanja.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Bagi Hasil - Transfer.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai dari kelompok belanja langsung dan belanja tidak langsung, dan belanja barang/jasa dari kelompok belanja langsung.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tidak berwujud.

Jumlah Belanja dalam Tahun Anggaran 2023 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar *Rp 24.949.397.067,00* realisasinya sebesar *Rp* 1.498.000.000 *atau* 4,9%.

NERACA KOMPERATIF TAHUN 2022 DAN Per Juni Tahun 2023

Neraca Komparatif Tahun 2022 dan Per Juni Tahun 2023, seperti pada Tabel 4.10. berikut.

Tabel 4.10. Neraca Komparatif Tahun 2022 dan
Per Juni Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	2	3	4
1	**ASET**	**454.641.299.046,27**	**458.683.243.814,11**
1.1	**ASET LANCAR**	**59.672.449.212,53**	**65.503.947.557,37**
1.1.01	Kas dan Setara Kas	26.955.664.094,09	9.267.732.649,93
1.1.01.04	Kas di BLUD	26.955.664.094,09	9.267.732.649,93
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	23.183.966.463,25	44.447.663.639,25
1.1.06.16	Piutang Pendapatan BLUD	23.183.966.463,25	44.447.663.639,25
1.1.10	Penyisihan Piutang	(11.111.915.909,81)	(11.111.915.909,81)
1.1.10.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	(11.111.915.909,81)	(11.111.915.909,81)
1.1.12	Persediaan	20.644.734.565,00	22.900.467.178,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	20.644.734.565,00	22.900.467.178,00
	JUMLAH ASET LANCAR	**59.672.449.212,53**	**65.503.947.557,37**
		0,00	**0,00**
1.3	**ASET TETAP**	**341.156.524.052,10**	**339.366.970.475,10**
1.3.01	Tanah	23.841.232.808,00	23.841.232.808,00
1.3.01.01	Tanah	23.841.232.808,00	23.841.232.808,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	383.127.166.090,87	382.576.206.770,87
1.3.02.01	Alat Besar	3.716.917.526,00	3.716.917.526,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	4.086.809.548,59	4.086.809.548,59
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	364.664.320,00	364.664.320,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	213.045.500,00	213.045.500,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	42.440.084.512,19	42.094.007.012,19
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.637.924.145,00	1.637.924.145,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	323.248.340.316,09	323.043.458.496,09
1.3.02.08	Alat Laboratorium	3.012.169.550,00	3.012.169.550,00
1.3.02.10	Komputer	4.134.746.523,00	4.134.746.523,00
1.3.02.11	Alat Eksplorasi	272.464.150,00	272.464.150,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	185.939.549.705,07	184.700.955.448,07
1.3.03.01	Bangunan Gedung	185.939.549.705,07	184.700.955.448,07
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.986.100.601,00	12.986.100.601,00
1.3.04.02	Bangunan Air	745.750.000,00	745.750.000,00
1.3.04.03	Instalasi	5.077.259.798,00	5.077.259.798,00
1.3.04.04	Jaringan	7.163.090.803,00	7.163.090.803,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	240.187.000,00	240.187.000,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	50.000.000,00	50.000.000,00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	190.187.000,00	190.187.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(264.977.712.152,84)	(264.977.712.152,84)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(264.483.734.085,84)	(264.483.734.085,84)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.526.906.259,00	1.526.906.259,00
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(2.020.884.326,00)	(2.020.884.326,00)
	JUMLAH ASET TETAP	**341.156.524.052,10**	**339.366.970.475,10**
		0,00	**0,00**

1.5	**ASET LAINNYA**	**53.812.325.781,64**	**53.812.325.781,64**
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	3.245.292.000,00	3.245.292.000,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	3.245.292.000,00	3.245.292.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	52.949.339.675,64	52.949.339.675,64
1.5.04.01	Aset Lain-lain	52.949.339.675,64	52.949.339.675,64
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.382.305.894,00)	(2.382.305.894,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.382.305.894,00)	(2.382.305.894,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	**53.812.325.781,64**	**53.812.325.781,64**
	JUMLAH ASET	**454.641.299.046,27**	**458.683.243.814,11**
		0,00	**0,00**
2	**KEWAJIBAN**	**47.996.957.817,81**	**47.996.957.817,81**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**47.996.957.817,81**	**47.996.957.817,81**
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	106.666.667,00	106.666.667,00
2.1.05.04	Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa	106.666.667,00	106.666.667,00
2.1.06	Utang Belanja	47.890.291.150,81	47.890.291.150,81
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	1.082.194.737,00	1.082.194.737,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	46.808.096.413,81	46.808.096.413,81
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**47.996.957.817,81**	**47.996.957.817,81**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**47.996.957.817,81**	**47.996.957.817,81**
		0,00	**0,00**
3	**EKUITAS**	**406.644.341.228,46**	**410.686.285.996,30**
3.1	**EKUITAS**	**406.644.341.228,46**	**410.686.285.996,30**
3.1.01	Ekuitas	385.773.370.773,46	366.530.430.034,30
3.1.01.01	Ekuitas	410.686.285.996,15	439.100.397.745,08
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(24.912.915.222,69)	(72.569.967.710,78)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	20.870.970.455,00	44.155.855.962,00
3.1.03.01	RK PPKD	20.870.970.455,00	44.155.855.962,00
	JUMLAH EKUITAS	**406.644.341.228,46**	**410.686.285.996,30**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**454.641.299.046,27**	**458.683.243.814,11**

LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) Per Juni Tahun 2023, seperti pada Tabel 4.11. berikut.

Tabel 4.11. Laporan Operasional (LO) RSUD Kota Mataram
Per Juni Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	**PENDAPATAN**	**86.279.683.907,87**	**178.480.541.756,25**	**(92.200.857.848,38)**	**(51,66)**
7.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**	**86.279.683.907,87**	**178.480.541.756,25**	**(92.200.857.848,38)**	**(51,66)**
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	86.279.683.907,87	178.480.541.756,25	(92.200.857.848,38)	(51,66)
7.1.04.16	Pendapatan dari BLUD-LO	86.279.683.907,87	178.480.541.756,25	(92.200.857.848,38)	(51,66)
7.1.04.16.01	Pendapatan dari BLUD-LO	107.543.381.083,87	208.395.772.031,25	(100.852.390.947,38)	(48,39)
7.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	(21.263.697.176,00)	(29.915.230.275,00)	8.651.533.099,00	(28,92)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**86.279.683.907,87**	**178.480.541.756,25**	**(92.200.857.848,38)**	**(51,66)**
	JUMLAH PENDAPATAN	**86.279.683.907,87**	**178.480.541.756,25**	**(92.200.857.848,38)**	**(51,66)**
8	**BEBAN**	**111.192.599.130,56**	**251.050.509.467,03**	**(139.857.910.336,47)**	**(55,71)**
8.1	**BEBAN OPERASI**	**111.192.599.130,56**	**206.399.781.116,48**	**(95.207.181.985,92)**	**(46,13)**
8.1.01	Beban Pegawai	13.451.537.879,00	34.699.089.757,00	(21.247.551.878,00)	(61,23)
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	10.197.188.377,00	14.700.171.340,00	(4.502.982.963,00)	(30,63)
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	8.065.278.700,00	11.540.093.620,00	(3.474.814.920,00)	(30,11)
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	654.761.226,00	998.683.336,00	(343.922.110,00)	(34,44)
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	117.960.000,00	230.830.000,00	(112.870.000,00)	(48,90)
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	655.017.000,00	1.014.285.000,00	(359.268.000,00)	(35,42)
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	197.675.000,00	184.515.000,00	13.160.000,00	7,13
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	491.297.280,00	716.958.000,00	(225.660.720,00)	(31,47)
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.052.027,00	14.622.844,00	429.183,00	2,94
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	147.144,00	183.540,00	(36.396,00)	(19,83)
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.605.747.262,00	4.179.303.803,00	(2.573.556.541,00)	(61,58)
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	449.162.904,00	992.449.521,00	(543.286.617,00)	(54,74)
8.1.01.02.04	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	443.994.692,00	1.698.180.000,00	(1.254.185.308,00)	(73,85)
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	712.589.666,00	1.488.674.282,00	(776.084.616,00)	(52,13)
8.1.01.99	Beban Pegawai BLUD	1.648.602.240,00	15.819.614.614,00	(14.171.012.374,00)	(89,58)
8.1.01.99.99	Beban Pegawai BLUD	1.648.602.240,00	15.819.614.614,00	(14.171.012.374,00)	(89,58)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	97.741.061.251,56	181.300.560.847,86	(83.559.499.596,30)	(46,09)
8.1.02.01	Beban Barang	6.294.367.429,00	13.958.473.504,00	(7.664.106.075,00)	(54,91)
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	6.294.367.429,00	13.958.473.504,00	(7.664.106.075,00)	(54,91)
8.1.02.02	Beban Jasa	5.029.400.000,00	0,00	5.029.400.000,00	100,00
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	5.029.400.000,00	0,00	5.029.400.000,00	100,00
8.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	86.417.293.822,56	167.342.087.343,86	(80.924.793.521,30)	(48,36)
8.1.02.99.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	86.417.293.822,56	167.342.087.343,86	(80.924.793.521,30)	(48,36)
8.1.03	Beban Bunga	0,00	279.763.272,00	(279.763.272,00)	(100,00)
8.1.03.06	Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek	0,00	279.763.272,00	(279.763.272,00)	(100,00)
8.1.03.06.01	Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek	0,00	279.763.272,00	(279.763.272,00)	(100,00)
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	0,00	(9.879.632.760,38)	9.879.632.760,38	(100,00)
8.1.07.04	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	(9.879.632.760,38)	9.879.632.760,38	(100,00)
8.1.07.04.16	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	0,00	(9.879.632.760,38)	9.879.632.760,38	(100,00)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	**111.192.599.130,56**	**206.399.781.116,48**	**(95.207.181.985,92)**	**(46,13)**
8.1.08	**Beban Penyusutan dan Amortisasi**	**0,00**	**44.650.728.350,55**	**(44.650.728.350,55)**	**(100,00)**
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	42.826.746.479,55	(42.826.746.479,55)	(100,00)
8.1.08.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar	0,00	42.826.746.479,55	(42.826.746.479,55)	(100,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	924.609.915,00	(924.609.915,00)	(100,00)
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	0,00	924.609.915,00	(924.609.915,00)	(100,00)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	406.401.383,00	(406.401.383,00)	(100,00)
8.1.08.03.01	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0,00	406.401.383,00	(406.401.383,00)	(100,00)
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	492.970.573,00	(492.970.573,00)	(100,00)
8.1.08.06.01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	492.970.573,00	(492.970.573,00)	(100,00)
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	**0,00**	**44.650.728.350,55**	**(44.650.728.350,55)**	**(100,00)**
	JUMLAH BEBAN	**111.192.599.130,56**	**251.050.509.467,03**	**(139.857.910.336,47)**	**(55,71)**
	SURPLUS/DEFISIT-LO	**(24.912.915.222,69)**	**(72.569.967.710,78)**	**47.657.052.488,09**	**(65,67)**

6. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

a. Informasi Umum.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram Pemerintah Kota Mataram sejak mulai beroperasi pada tahun 2010 dipimpin oleh Direktur sesuai dengan Perda Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram.

Besarnya dukungan Pemerintah Kota Mataram baik dari segi financial dan non financial terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram berdampak terhadap kinerja dan pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat. Hal ini terlihat dari tingkat kunjungan yang terus meningkat, jenis pelayanan yang terus bertambah dan jumlah pendapatan yang terus meningkat dari tahun ketahun.

Pada tahun 2013 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram naik kelas menjadi kelas B, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum daerah Kelas B Kota Mataram.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram ini terdiri dari direktur, dua wadir yaitu Wadir Umum dan Keuangan dan Wadir Pelayanan dengan struktur organisasi.

Untuk pelaksanaan visi, misi dan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram ini telah didukung dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

VISI:

"Rumah Sakit Pilihan Masyarakat Dalam BidangPelayanan Kesehatan, Pendidikan Dan Penelitian Yang Berstandar Internasional"

MISI:

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, berkualitas dan professional.
2. Melaksanakan pendidikan dan penelitian kesehatan yang berkelanjutan dan berkualitas

3. Meningkatkan kompetensi SDM yang berdaya saing
4. Meningkatkan kesejahteraan karyawan/karyawati
5. Meningkatkan sarana prasana sesuai standar RS pendidikan dan kemajauan IPTEKDOK.

Struktur Organisasi :



Bagan 1. Struktur Organisasi RSUD Kota Mataram

b. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Dalam operasionalnya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram memiliki kegiatan dan layanan produk berupa:

1). Layanan Rawat Jalan Pagi dan Sore:

- Poli Gigi
- Poli Anak
- Poli Penyakit Dalam
- Poli Mata
- Poli Kandungan dan Kebidanan
- Poli Syaraf
- Poli Bedah
- Poli Fisioterpi
- Poli Kosmetik dan Kulit

- Poli Umum
- Poli Ortopedi
- Poli THT

2). Layanan Rawat Inap:

- Kelas VVIP dan VIP
- Kelas I, II dan III

3). Pelayanan penunjang dan lainnya

- Pelayanan IGD 24jam Terintegrasi dan Mataram Emergency Medical Service (MEMS)
- Pelayanan Rawat Inap Kls I, II, dan III
- Pelayanan Rawat Inap Kls VIP A,VIP B dan VIP Nifas
- Pelayanan Rawat Jalan pagi-sore dan Eksekutif
- Pelayanan Kamar Operasi
- Pelayanan Radiologi
- Pelayanan Laboratorium
- Farmasi / Apotek 24 jam
- Pelayanan ICU/ICCU/Pelayanan Jantung Terpadu
- Pelayanan NICU/PICU
- Pelayanan Ruang Bersalin dan Nifas
- Pelayanan Hemodialisa
- Pelayanan MRI Dan CT Scan
- Pelayanan Gizi
- Pelayanan Ambulans/Jenazah
- HCU (High Care Unit)/Stoke Center
- Pelayanan Farmasi/Antar Obat Gratis
- Pelayaan Bank Darah
- Pelayanan CSSD
- Pelayanan Terapi Hiperbaric Chamber
- Pelayanan Cathlab/Pelayanan Jantung Terpadu
- Pelayanan Insiminasi Bayi Tabung (Intrauterine Insemination)
- Rumah Duka/Kamar Jenazah
- Pelayanan Diklat/Pendidikan.

- Pelayanan home Care
- Pelayanan Artis Cantik (Antar Obat Gratis cepat akurat dan Simpatik)
- Pelayanan Permaisuri Dancing (Persalinan Aman Bayi Sehat Ibu Berseri dengan ANC rutin USG)

c. Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan & pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

1). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3). Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaan Daerah;
5). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah;
6). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8). Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
9). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan umum Daerah;
12). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang

Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;

13). Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram;

14). Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah Kota Mataram;

15). Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;

16). Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum daerah Kelas B Kota Mataram.

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

RSUD Kota Mataram secara garis besar telah melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dengan baik, berdasarkan analisa dengan kinerja pelayanan dan kinerja keuangan terus meningkat. Dengan pengembangan pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan diharapkan dapat meraih peluang sekaligus masuk dalam penetra

Kemampuan pembiayaan dari tahun ke tahun semakin baik hal ini dapat dilihat dari kemampuan membiayai operasionalnya, sedangkan subsidi diharapkan dapat digunakan untuk investasi dalam upaya mengembangkan kemampuan dan jenis pelayanan.

Mengingat teknologi kedokteran berkembang begitu cepat dan berteknologi canggih maka bantuan dan subsidi pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota masih dibutuhkan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

B. SARAN.

Agar dalam pelaksanaan Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2023 berjalan dengan baik dibutuhkan perbaikan manajemen, baik dalam tatakelola keuangan, manajemen pengadaan serta manajemen pemeliharaan sehingga akan dicapai pengelolaan keuangan BLUD yang transparan, akuntabel dan efisiensi untuk mewujudkan Visi dan Misi Rumah Sakit.